

ENEWSLETTER

PKS PARLEMEN

KREATIF

Edisi April III Tahun 2021 No. 14

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M

*Utamakan Prioritas
Batalan
Pemindahan
Ibukota*

Reshuffle Tidak Biasa



Sekali lagi kita menyaksikan bahwa keseriusan pemerintah untuk mengembangkan IPTEK tidak seperti apa yang digembar-gemborkan selama ini. Diantara hiruk-pikuk itu Pemerintah sempat memunculkan wacana tentang Bukit algoritma, Inovasi 5.0 dan sebagainya. Entah sekarang sudah sampai mana, kita tidak tau persis.

Belum lama ini Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, hanya terbatas pada dua kementerian dan satu lembaga. Reshuffle yang tidak sampai 20 persen dari komposisi Kabinet. Sah, legal dan Hak Prerogratif Presiden.

Kementerian Ristekdikti yang awalnya berdiri sendiri dan membawahi enam Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Penelitian (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Kini dibawah satu komando Nadiem Makarim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Pun kemudian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi. Dua wajah lama yang dilantik sebagai menteri di pos yang sama. Maka kita bisa bilang Reshuffle tidak biasa. Apa yang baru, dimana yang aneh. itu-itu aja kok.

Dari seluruh keriuhan sementara itu, sesungguhnya struktur kabinet baru ini tidak bisa dilepaskan dari kelembagaan baru bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pun akhirnya sebagian publik menghubungkan dengan lembaga yang relatif lama yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tidak salah dan wajar saja. Kebijakan publik akan meminta pertanggungjawaban publik.

Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN. Lewat Perpres tersebut diatur bahwa BRIN akan membawahi empat lembaga penelitian yang dilebur menjadi satu.

Sekali lagi kita menyaksikan bahwa keseriusan pemerintah untuk mengembangkan IPTEK tidak seperti apa yang digembar-gemborkan selama ini. Diantara hiruk-pikuk itu Pemerintah sempat memunculkan wacana tentang Bukit algoritma, Inovasi 5.0 dan sebagainya. Entah sekarang sudah sampai mana, kita tidak tau persis.

Salah satu masalah krusial dalam pengembangan riset dan inovasi nasional adalah terkait efek pengenceran (dilution effect), baik terkait anggaran, SDM dan peralatan (sarana dan prasarana) lptek yang tersebar di berbagai lembaga litbang, di LPNK ristek maupun balitbang

Kementerian teknis. Maka tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BRIN dan Kemendikbud-Ristek untuk menjawab keraguan publik. Tidak sekedar dijawab dengan selfie, maka inovasi akan berkerja sendiri seperti Artificial Intelligence (AI). Rasanya masih jauh saat ruang ego masih melampaui angka-angka empirik. Butuh Integrasi dan Kolaborasi.

Kenapa integrasi riset tersebut penting dilakukan. Salah satunya terkait anggaran riset nasional yang relatif kecil. Anggaran litbang Indonesia yang sudah kecil, hanya sekitar Rp 20 triliun atau sekitar 0.2 persen dari PDB akan menjadi semakin kecil karena persebaran ini. Negara tetangga seperti Malaysia saja anggaran risetnya sudah di atas 0.5% dan Unesco menargetkan minimal 1% PDB.

Bahkan, bila dibandingkan

dengan anggaran riset perusahaan seperti Microsoft (US\$14.7 miliar= Rp 206 triliun) atau Huawei (US\$15.3 miliar= Rp 214 triliun) pada tahun 2018 saja, anggaran riset kita sudah kalah jauh.

Dalam sisi regulasi, Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisan Iptek) yang pada awalnya diharapkan menjadi titik cerah perbaikan ekosistem penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ternyata menjadi titik balik dengan adanya reshuffle. Apalagi pada akhirnya dia termarginalkan pada kementerian lain yang punya masalah sangat kompleks dan seringkali 'blunder'. So, Kita tunggu sama-sama

**Hilangnya Nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
Dalam Naskah Kamus Sejarah Indonesia**

KETUA FPKS PROTES KERAS



KUTIPAN

Hal ini merupakan keteledoran dan menunjukkan ketidakpahaman tim penyusun tentang sejarah bangsa. Siapapun yang menyusun dan menyebarkan jika ada unsur kesengajaan, ini bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. Maka buku tersebut atau kalau masih draf buku sekalipun harus segera ditarik dari peredaran karena bisa menyesatkan anak bangsa.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Ketua Fraksi PKS **Protes Keras** Hilangnya Nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Dalam Naskah Kamus Sejarah Indonesia

KUTIPAN

Beredar Draf Naskah Kamus Sejarah Indonesia yang tidak mencantumkan Kiai Hasyim Asy'ari, Pendiri Nahdatul Ulama

sebagai tokoh yang berperan besar dalam sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Anehnya sejumlah nama asing justru muncul.

Menurut beberapa sumber buku tersebut draf yang dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun Kemendikbud telah membantah bahwa draf yang beredar berupa salinan softcopy itu tidak resmi dan bukan dari Kemendikbud. Kemendikbud sendiri sedang menyempurnakan buku Kamus Sejarah Indonesia.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini hal ini merupakan ketelaoran dan menunjukkan ketidakpahaman tim penyusun tentang sejarah bangsa. Siapapun yang menyusun dan menyebarkan jika ada unsur

kesengajaan, ini bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. Maka buku tersebut atau kalau masih draf buku sekalipun harus segera ditarik dari peredaran karena bisa menyesatkan anak bangsa.

"Seluruh anak bangsa harus paham secara utuh sejarah bangsa Indonesia dan tidak boleh ada yang memutus mata rantai sejarah perjalanan bangsa. Karena itu kalau hal ini disengaja merupakan pengkhianatan terhadap sejarah," tegas Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menegaskan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU mutlak masuk dalam dokumen sejarah manapun karena peran dan kiprahnya yang luar biasa baik pada masa penjajahan maupun

kemerdekaan. Apatah Beliau adalah tokoh bangsa dan pahlawan nasional.

"Hadratus Syekh Hasyim sebagai pendiri NU dengan Resolusi Jihad-nya yang terkenal mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Juga perannya sebagai rujukan ketika bangsa ini membentuk dasar negara dan konstitusi bernegara. Jangan putus mata rantai sejarah tersebut. Jangan lupakan jasa ulama besar bangsa ini," tandasnya.

Menurut Ketua Fraksi PKS ini semua anak bangsa harus memahami ideologi negara dan sejarahnya. Menjadi tugas Kemendikbud untuk menyusun kurikulum dan materi-materi kebangsaan yang valid dan tidak ada penyimpangan serta diwajibkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga SMU. "Pemerintah harus segera klarifikasi dan tarik draf naskah yang beredar tersebut, serta mengusut motif tidak dicantulkannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari," pungkas Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Semua anak bangsa harus memahami ideologi negara dan sejarahnya. Menjadi tugas Kemendikbud untuk menyusun kurikulum dan materi-materi kebangsaan yang valid dan tidak ada penyimpangan serta diwajibkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga SMU. "Pemerintah harus segera klarifikasi dan tarik draf naskah yang beredar tersebut, serta mengusut motif tidak dicantulkannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari,"

Pancasila Tak Jadi Mata Kuliah Wajib
dalam PP No. 57/2021

HNW Sarankan Presiden Segera **Cabut** PP Tersebut

KUTIPAN

Jakarta (17/04) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan terulangnya kecerobohan dalam pembuatan peraturan, dimana sebelumnya ada hilangnya 'frasa Agama' dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035

dan sekarang hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Wajib untuk Perguruan Tinggi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021.

HNW sapaan akrabnya mengusulkan, untuk mengakhiri polemik dan kegaduhan, agar Pemerintah segera mencabut dan mengevaluasi secara menyeluruh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang sudah ditandatangani Presiden dan diundangkan oleh Menkumham.

"Padahal menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, suatu hal yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi," terang HNW.

HNW mengatakan bahwa upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan merevisi PP No.57/2021 itu tidaklah memadai.

"Apalagi sebelumnya Kemendikbud juga melakukan kesalahan fatal dengan menghilangkan frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional," ujarnya.

HNW menambahkan, perlu dilakukan evaluasi mendasar dan menyeluruh, karena setelah hilangnya frasa Agama, dan

sekarang hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib, di tengah gencarnya Pemerintah memerintahkan Rakyat untuk melaksanakan Pancasila, memerangi terorisme dan radikalisme.

"Peristiwa bermasalah itu tentu bukan hal yang biasa saja dan bisa menjadi sangat serius," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (17/04).

Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa evaluasi menyeluruh dan pencabutan terhadap PP tersebut perlu dilakukan agar kebijakan atau proses legislasi yang dilakukan oleh Pemerintah tidak lagi dilakukan secara grusa grusu dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

"Ini sudah kesekian kali terjadi. Sebelumnya, hilangnya frasa agama dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, atau Perpres yang membolehkan investasi miras, yang akhirnya dicabut oleh Presiden. Dan sekarang hilangnya kewajiban Mata Kuliah Pancasila," ujarnya.

"Ini untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak lagi terjadi. Dan siapapun yang



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

"Kok bisa PP yang tak sesuai dengan UU tersebut bisa sampai ke Presiden dan akhirnya ditandatangani oleh Presiden.

Seharusnya hal ini tidak akan terjadi apabila seluruh proses berjalan dengan prinsip amanah/ profesional, teliti dan hati-hati"

bertanggung jawab atas kesalahan ini agar diberi sanksi. Karena masalah itu tidak hanya mispersepsi seperti disampaikan oleh Mendikbud, tetapi adanya proses penyiapan suatu PP yang isinya tidak

sesuai dengan Undang-Undang dibiarkan sampai ke meja Presiden bahkan sudah ditandatangani Presiden dan diundangkan oleh Menkumham.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Sebut PKI Gemar Belokan Sejarah,

Tifatul Sembiring: **Hati-hati** Mereka Masuk ke Pelajaran Sejarah dan Kurikulum

KUTIPAN

Jakarta (23/04) — Anggota DPR RI, Tifatul Sembiring belum lama ini menyoroti kabar munculnya sejumlah nama tokoh komunis dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

Tifatul mengaku sepakat dengan pernyataan bahwa sejarah kejayaan Partai Komunis Indonesia (PKI) tengah dibelokkan.

Menurutnya para anggota atau pengikut PKI memang gemar memutarbalikkan fakta dan membelokkan sejarah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihak PKI tak senang dengan sejarah yang ada atau yang lurus. Maka pembelokkan sejarah dilakukan oleh mereka.

"Emang bener sih, PKI dan antek2nya ini suka memutar balikkan fakta, mem-belok2an sejarah biar bengkok. Nggak suka jalan yg lurus," ujar Tifatul Sembiring seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari akun Twitter @tifsembiring pada Kamis, 22 April 2021.

Oleh sebab itu, Tifatul mengingatkan masyarakat agar berhati-hati pada orang-orang PKI lantaran paham mereka kini bisa masuk lewat pelajaran sejarah.

Menyenggung permasalahan soal Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dia juga menyatakan bahwa para pengikut PKI ini bisa saja masuk melalui kurikulum pendidikan.

"Hati2, mereka masuk lewat pelajaran sejarah, lewat kurikulum pendidikan," ucapnya.

Kemudian masih terkait dengan itu, Tifatul lantas mempertanyakan kebenaran dari hilangnya mata pelajaran agama dan Pancasila dalam kurikulum pendidikan.

"Apa benar matpel Agama dan Pancasila dihilangkan...?," ujar Tifatul menambahkan.

Seperti diketahui bersama, Kemendikbud belakangan ini memang menjadi sorotan banyak pihak lantaran beberapa kebijakannya yang menuai kritikan.

Beberapa di antaranya adalah hilangnya sejumlah mata pelajaran penting seperti Bahasa Indonesia, pelajaran Pancasila, dan frasa agama.

Bahkan baru-baru ini publik dihebohkan dengan hilangnya profil pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari, dan munculnya sejumlah nama tokoh komunis seperti DN Aidit serta Raden Darsono Notosudirjo dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

Kejadian itu pun kembali menuai perdebatan di tengah publik hingga memunculkan dugaan-dugaan terkait munculnya kembali PKI.



Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

Ketua Fraksi PKS MPR RI

"Emang bener sih, PKI dan antek-anteknya ini suka memutar balikkan fakta, mem-belok-belokkan sejarah biar bengkok. Nggak suka jalan yang lurus,"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Wakil Ketua Komisi 1 FPKS **Berduka** atas Gugurnya Kabinda Papua dan Prajurit TNI awak KRI Nanggala 402

KUTIPAN

Solo (25/04) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, turut berduka

dengan kabar Gugurnya salah satu putra terbaik Badan Intelijen Negara, Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya yang gugur dalam tugas mulia di bumi cendrawasih dan pernyataan resmi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memastikan 53 awak kapal selam KRI Nanggala telah gugur.

“ini merupakan kabar duka kembali dari tanah air kita, salah satu putra terbaik kita Kepala BIN Daerah Papua yang sedang melaksanakan tugas untuk meninjau lokasi pembakaran SD dan sejumlah rumah penduduk yang dilakukan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Selanjutnya keterangan resmi Panglima TNI semua Prajurit KRI Nanggala telah gugur. Ini jelas duka mendalam untuk

keluarga besar BIN dan TNI serta seluruh rakyat Indonesia, saya berharap keluarga besar diberikan kesabaran dan ketabahan,” jelas Kharis dalam keterangan pers kepada media Ahad (25/04).

Anggota DPR asal Fraksi PKS memastikan dukungan langkah terukur dan tegas harus dilakukan oleh Polri, TNI dan BIN untuk tetap teguh menjaga NKRI dari rongrongan separatisme di Papua.

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyatakan mendukung penuh langkah Panglima TNI mengatasi KKB di Papua yang tegas dan terukur demi penegakan hukum bersama dengan BIN dan Polri bahu membahu tuntas untuk NKRI,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera asal Solo ini juga menyatakan bahwa TNI, Polri

dan BIN telah mengambil tindakan profesional, jadi ia berharap dunia internasional agar dapat melihat secara proporsional masalah di Papua sebagai upaya penegakan hukum.

“Prajurit TNI-POLRI banyak sudah gugur di Papua hari ini sekali lagi salah satu putra terbaik NKRI, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi Internasional dalam masalah dalam penegakan hukum di Indonesia,” terang Kharis.

Kharis juga mendukung penuh terhadap anggaran pertahanan dalam pemeliharaan dan perawatan (harwat) serta peremajaan alutsista yang harus sesuai dengan perencanaan sehingga alutsista



Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

“Prajurit TNI-POLRI banyak sudah gugur di Papua hari ini sekali lagi salah satu putra terbaik NKRI, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan

berfungsi dengan baik.

“Kami di Komisi 1 akan mendukung penuh upaya bersama semua Mitra terkait untuk perbaikan alutsista

kedepan dan berharap semua Prajurit yang gugur agar dinaikkan pangkatnya sebagai penghormatan negara” tutup Kharis.

Aleg PKS: Melalui KTT ASEAN, Hentikan Kekerasan dan **Pulihkan Demokrasi** di Myanmar

KUTIPAN

Yogyakarta (24/04) --- Menyambut pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar di Jakarta

hari ini Sabtu (24/04), Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan berharap pertemuan pemimpin negara ASEAN tersebut akan menyatukan sikap dalam upaya menghentikan segala bentuk kekerasan yang berlangsung, menciptakan perdamaian dan menjadi jalan keluar untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.

"Ini forum yang sangat strategis, saya lihat para pemimpin negara ASEAN sudah kompak melihat krisis Myanmar saat ini sudah diluar batas, ada pelanggaran HAM berat dengan korban jiwa lebih dari 700 jiwa. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak ikut campur terhadap persoalan yang terjadi pada Myanmar yang merupakan anggota ASEAN. ASEAN bertanggung jawab untuk hentikan kekerasan dan

pulihkan demokrasi." terang Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS berharap KTT Asean dapat bersikap secara tegas dengan hasilkan keputusan yang dapat mencegah kondisi Myanmar semakin buruk.

"Ada kondisi krisis Myanmar semakin parah dengan adanya konflik kelompok etnis. Jika situasi ini tidak segera ditangani bisa mengarah kepada perang saudara. Hal ini akan rawan adanya intervensi negara-negara besar yang akan membuat kawasan ASEAN menjadi tidak kondusif dan tidak stabil," ungkapnya.

Sukamta lebih lanjut meminta KTT ASEAN perlu memberi tenggat waktu yang ketat kepada rezim kudeta yang illegitimate untuk menjalankan keputusan yang dihasilkan.

"Kabarnya pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan hadir. KTT harus beri batas waktu kepada rezim untuk penghentian segala bentuk kekerasan, membebaskan semua tahanan politik dan kembalikan kedaulatan sipil. KTT juga perlu membentuk tim panel untuk melakukan monitoring pelaksanaan keputusan," ujar Sukamta.

Sukamta yang juga menjabat Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap KTT ASEAN bisa berjalan lancar dan sukses.

"Saya sampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dan Bu Menlu Retno Marsudi yang telah menginisiasi KTT ASEAN untuk bahas krisis Myanmar. Semoga perhelatan ini bisa berjalan lancar dan sukses, mampu hadirkan solusi bagi Myanmar," tutup Anggota DPR dari Dapil Yogyakarta ini.



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

“Ada kondisi krisis Myanmar semakin parah dengan adanya konflik kelompok etnis. Jika situasi ini tidak segera ditangani bisa mengarah kepada perang saudara. Hal ini akan rawan adanya intervensi negara-negara besar yang akan membuat kawasan ASEAN menjadi tidak kondusif dan tidak stabil”

RUANG ALEG

BY HUMAS FRAKSI PKS

Program terbaru dari Fraksi PKS DPR RI yang memperlihatkan kepada publik kehidupan Anggota Legislatif PKS dibalik kegiatan politik dan mengajak masyarakat untuk merasakan kehangatan obrolan santai bersama para Wakil Rakyat.

Hadir setiap pekan
Sabtu, pukul 10.00 WIB
hanya di:

 youtube **PKSTV DPR RI**



Nasir Djamil Sebut Komisi II DPR RI **belum Pernah** Bahas Pilkada Aceh dengan Mendagri dan KPU

KUTIPAN

Nasir Djamil mengakui memang pernah dirinya mengikuti pertemuan virtual yang difasilitasi Dirjen Otda Kemendagri yang dihadiri Komisi I DPR Aceh, mewakili Gubernur Aceh, KPU, pejabat Kemenko Polhukam dan pihak terkait lainnya.

Jakarta (23/04) — Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil menyatakan Komisi II belum pernah bahas khusus Pilkada Aceh dengan Mendagri dan lembaga penyelenggara Pemilu, KPU.

Anggota DPR RI Dapil Aceh Nasir Djamil menyampaikan hal ini menjawab Serambinews.com, Kamis (22/4/2021).

“Saya sudah cek ke pimpinan Komisi II apakah sudah ada keputusan Komisi II DPR terkait Pilkada Aceh dan pembahasan tentang Pilkada Aceh dengan Kemendagri dan penyelenggara pemilu. Ternyata

belum ada,” kata Nasir Djamil.

Nasir Djamil mengakui memang pernah dirinya mengikuti pertemuan virtual yang difasilitasi Dirjen Otda Kemendagri yang dihadiri Komisi I DPR Aceh, mewakili Gubernur Aceh, KPU, pejabat Kemenko Polhukam dan pihak terkait lainnya.

Saya hadir dalam pertemuan itu, selaku Anggota Komisi II DPR RI. Tapi bukan mewakili suara Komisi II, sebab memang belum ada pembahasan dan keputusan soal Pilkada Aceh di Komisi II,” ujar Nasir Djamil mengenai

pertemuan virtual pada 11 Februari 2021 itu.

Menurut Nasir Djamil yang dia utarakan dalam pertemuan itu adalah pendapat pribadi selaku anggota Komisi II DPR, bukan pendapat kolektif Komisi II.

Ia juga menyebutkan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Syamsurizal secara pribadi pernah menyatakan setuju dan mendukung pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.

Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Komisi I DPRA yang dipimpin Ketua Komisi I Tgk Muhammad Yunus M Yusuf di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Maret 2021.

“Tapi itu juga pernyataan pribadi, belum menjadi pendapat Komisi II,” ujar Nasir lagi.

Nasir Djamil mengatakan dirinya kemudian melakukan komunikasi dengan Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik sehubungan dengan terbitnya surat Dirjen Otda terkait Pilkada Aceh.

**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

“Saya sudah cek ke pimpinan Komisi II apakah sudah ada keputusan Komisi II DPR terkait Pilkada Aceh dan pembahasan tentang Pilkada Aceh dengan Kemendagri dan penyelenggara pemilu. Ternyata belum ada,”

Poros Islam Dan Pemilu 2024

Cegah Liberalisasi Demokrasi, Mardani Desak Revisi UU Pemilu

KUTIPAN

Jakarta (23/04) - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mendesak revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) agar tidak terjadi liberalisasi demokrasi.

Hal tersebut disampaikan dalam acara diskusi pekanan, Indonesia Leaders Talk bersama dengan beberapa narasumber yaitu Rocky Gerung, Hidayat Nur Widhi, dan Eep S Fatah.

Politisi daerah pemilihan DKI Jakarta ini bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengaku sedang mengemukakan banyak hal terkait dengan penundaan revisi dari UU Pemilu No. 7 tahun 2017 dan keluarnya UU tersebut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Saat ini revisi UU Pemilu sudah tidak dimasukkan ke

Prolegnas. PKS protes karena menurut kami banyak sekali yang harus direvisi di dalam UU Pemilu No. 7 tahun 2017." Ungkap Mardani, Jum'at (23/04/2021).

Salah satu yang paling utama, menurut Mardani, adalah presidential threshold yang perlu diturunkan dari 20 persen menjadi sepuluh persen. Hal ini bertujuan untuk memperbesar peluang dan interaksi dari luar sehingga diharapkan adanya kontestasi-kontestasi karya dan gagasan dan dapat "meliberalisasi demokrasi" secara positif agar tidak dikuasai oligarki.

Mardani meyakinkan untuk terus memperjuangkan revisi UU Pemilu tersebut dengan mengemukakan

skenario yang telah disampaikan oleh KPU mengenai Pemilu 2024.

Beberapa partai menyatakan pembahasan Pemilu masih bisa dibahas dan kami akan tetap mendorong karena kita butuh banyak penyempurnaan. Karena melihat pada Pemilu 2019 yang menjadi titik hitam demokrasi kita yaitu para pejuang kita, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dan hal tersebut harus kita cegah." Jelas Mardani.

Adapun skenario yang telah disampaikan adalah pada bulan Maret 2024 akan dilakukan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sama seperti di tahun 2019, dengan format lima kotak suara. Sedangkan untuk Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan di bulan November 2024. Mardani menilai hal ini tidak efektif karena menilai kembali Pemilu 2019 dimana ada lebih dari sepuluh juta surat suara yang tidak terpakai di Pileg.



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

"Pilar Indonesia itu ada dua, yaitu selalu ada kelompok agamis dan kelompok nasionalis. Ketika harmoni keduanya berjalan maka Indonesia akan maju. Tetapi, ketika ada kelompok yang tidak menginginkan koeksistensi, dan menginginkan zero sum game, kita akan menghadapi bencana"

Mardani juga menyampaikan apabila sesuai skenario KPU, akan berjalan proses pendaftaran untuk Pileg dan Pilpres di tahun 2022. Dan selama setahun kedepan akan terjalin komunikasi dan koordinasi dari berbagai pihak yang dilakukan oleh para calon

untuk publik.
"Mungkin selama setahun kedepan, komunikasi, koordinasi ataupun berbagai aksi bisa dilakukan agar publik tidak membeli kucing didalam karung." Kata Mardani.
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



PKS



**Akun Facebook Official
Fraksi PKS DPR RI**

BERPINDAH

dari **Fraksi PKS DPR RI**
menjadi

FPKS DPR RI



PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

KUTIPAN

Apabila RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan, Dimiyati khawatir pelaku kejahatan dapat terus menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan. Ini kan banyak kasus-kasus yang seperti itu, apalagi uangnya dibawa kabur ke luar negeri, dia maling di sini, rampok di sini, uangnya dibawa keluar," kata Dimiyati.

Jakarta (18/04) — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Dimiyati Natakusumah mengatakan, fraksinya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Ia pun mendorong agar pemerintah segera mengusulkan RUU tersebut masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Saya berharap memang RUU ini segera menjadi prioritas, tetapi itu tergantung pemerintah yang diwakili Menkumham, kan di situ

Menkumham sebagai leading sector-nya untuk pembahasan prolegnas dan prolegnas prioritas," kata Dimiyati saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/04/2021).

Menurut Dimiyati, pemerintah sudah semestinya mendorong RUU tersebut ke DPR karena pembahasan di tingkat pemerintah sudah lama selesai.

Selain itu, ia juga menilai RUU tersebut urgen untuk segera disahkan agar ada payung hukum untuk mengambil alih seluruh hasil tindak pidana.

"Negara ini kan kerugian keuangan negara sangat besar,

utang juga sangat besar, ini yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah," kata dia.

Apabila RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan, Dimiyati khawatir pelaku kejahatan dapat terus menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan.

"Ini kan banyak kasus-kasus yang seperti itu, apalagi uangnya dibawa kabur ke luar negeri, dia maling di sini, rampok di sini, uangnya dibawa keluar," kata Dimiyati.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyinggung janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacita lantaran RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Dapat kami sampaikan kembali. Kedua RUU ini telah menjadi janji Bapak Presiden pada Nawacita 2014-2019 dan kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," ujar Dian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III, Rabu (24/3/2021).



**DR. H. R. A. DIMYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**
Anggota Komisi III DPR RI

"Saya berharap memang RUU ini segera menjadi prioritas, tetapi itu tergantung pemerintah yang diwakili Menkumham, kan di situ Menkumham sebagai leading sector-nya untuk pembahasan prolegnas dan prolegnas prioritas"

Tingkatkan Pendapatan Petani, Johan Harap Harga Jagung **Tetap Stabil** di NTB

KUTIPAN

Sumbawa (25/04) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan turut memberikan apresiasi atas stabilnya harga jagung di Provinsi NTB.

Pasalnya, tahun ini terjadi kenaikan harga jagung dibanding tahun sebelumnya dan relatif lebih stabil maka hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini diungkapkan Johan mengingat NTB merupakan salah satu sentra produksi jagung nasional dengan luas panen mencapai 259.817 Ha dan memiliki prospek pengembangan agribisnis jagung yang sangat potensial.

Politisi PKS ini turut berbagia jika harga di tingkat petani dalam kondisi stabil dan menguntungkan petani serta Johan berharap harga jagung tetap stabil di NTB agar pendapatan petani meningkat.

"Saya minta kepada pemerintah untuk terus menjaga kestabilan harga

jagung di tingkat petani sampai semua petani sudah panen, jangan sampai harga turun pada saat terjadi panen jagung di berbagai daerah dan hal ini harus diwaspadai demi kesejahteraan petani kita," tutur Johan.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini berharap pengembangan bisnis dari budidaya jagung di Provinsi NTB ini terus berkembang serta terus diupayakan meningkatkan keberhasilan usaha tani jagung dan tata kelola pemasaran jagung yang menguntungkan petani.

"Saya melihat kestabilan harga dan kebijakan pasar jagung dari pemerintah perlu selalu diperhatikan sebab petani mesti dibantu dalam hal pemasaran, ketersediaan Gudang, ketersediaan sarana transportasi, serta kualitas jalan di pedesaan," ujar Johan. Legislator senayan dari

dapil NTB 1 ini mendorong pemerintah untuk selalu memastikan perlindungan kepada petani dalam proses produksi jagung dengan menjamin tersedianya benih, pupuk dan pestisida pada saat produksi dengan harga yang sesuai secara tepat dan selalu menguntungkan petani.

"Saya juga meminta agar petani diberikan bantuan alat dan dukungan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan nilai tambah terhadap komoditi jagung yang dihasilkan oleh petani di NTB ini," urai Johan.

Johan menandakan untuk mencapai target produksi jagung yang berkualitas dan harga yang terus stabil maka diperlukan Kerjasama semua stakeholders Pertanian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada petani di NTB.

"Harus ada Kerjasama yang baik dari semua pihak untuk membantu petani jagung terutama kemiraan usaha, adopsi teknologi, kualitas hasil, pengendalian hama, prosesing hasil panen sehingga harga akan tetap stabil dan kesejahteraan petani bisa meningkat," tutup Johan Rosihan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya minta kepada pemerintah untuk terus menjaga kestabilan harga jagung di tingkat petani sampai semua petani sudah panen, jangan sampai harga turun pada saat terjadi panen jagung di berbagai daerah dan hal ini harus diwaspadai demi kesejahteraan petani kita"

Aleg PKS Kembali Kritisi Rencana Impor 3,7 Juta Ton Garam

KUTIPAN

Slamet juga memaparkan kebiasaan impor garam ini tidak hanya terjadi pada tahun 2021. Sebab dalam periode 2010-2019, Indonesia rata-rata mengimpor 2,3 juta ton garam per tahunnya.

Jakarta (16/04) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton pada 2021 ini.

Jakarta (16/04) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton pada 2021 ini. Hal itu dikatakan Slamet dalam webinar nasional tentang polemik impor garam mau sampai kapan? Yang digelar bidang tani nelayan DPP PKS.

"Luas laut yang membanggakan tapi belum bisa kita banggakan dengan potensi yang mampu dikelola," kata Slamet, Jumat, (16/04).

Legislator asal Sukabumi ini menjelaskan bahwa dari total neraca garam Indonesia, 2,9 juta ton di antaranya berasal dari impor. Alasan pemerintah dalam melakukan impor ini selalu sama, yakni produk lokal yang dianggap belum memenuhi standar.

"Justru di sini seharusnya pemerintah berperan dengan mendorong pengembangan produk dalam negeri," jelas Slamet.

Slamet juga memaparkan kebiasaan impor garam ini tidak hanya terjadi pada tahun 2021. Sebab dalam periode 2010-2019, Indonesia rata-rata mengimpor 2,3 juta ton garam per tahunnya.

"Impor ini 80 persen Australia, 19 persen dari India, sisanya negara lain," tutupnya.

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Dari total neraca garam Indonesia, 2,9 juta ton di antaranya berasal dari impor. Alasan pemerintah dalam melakukan impor ini selalu sama, yakni produk lokal yang dianggap belum memenuhi standar. Justru di sini seharusnya pemerintah berperan dengan mendorong pengembangan produk dalam negeri”



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan
ASPIRASI ANDA
DI HARI ASPIRASI
FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

Aleg PKS: Penamaan Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed **Kurang Tepat**

KUTIPAN

Tasikmalaya (17/04) — Pemerintah mengubah nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ).

Peresmian nama jalan itu dilakukan pada Senin (12/4) oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Anggota Komisi V DPR RI asal PKS, Toriq Hidayat, menilai kurang tepat penggantian nama Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated menjadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed.

"Jujur saja, Uni Emirat Arab (UEA) tidak memiliki kaitan apa-apa dengan pembangunan jalan tol tersebut," katanya.

Ia menyebutkan, Jalan tol Jakarta—Cikampek atau Japek II elevated yang memiliki panjang 36,4 kilometer ini dibangun oleh konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Rangkai Sugiron Perkasa dengan komposisi kepemilikan saham keduanya, masing-masing 80 persen dan 20 persen.

"Pada saat peresmiannya tanggal 12 Desember 2019 lalu Jalan Tol Jakarta – Cikampek ini diberi nama sebagai Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated. Menurut UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, Jalan tol merupakan jalan nasional maka layak nya diberikan nama nasional," ungkap Toriq.

Menurutnya, Pemerintah Pusat sendiri belum memiliki aturan terkait pemberian nama jalan nasional yang berada dibawah kewenangannya. Berbeda dari beberapa Pemda yang justru sudah memiliki aturan sendiri terkait pemberian nama jalan yang berada dibawah kewenangannya.

"Rakyat Indonesia lebih berhak untuk menyematkan nama Pahlawan Nasional pada jalan tol japek II tersebut, sebab masih banyak nama Pahlawan Nasional yang namanya belum diabadikan menjadi nama jalan nasional," tambah Toriq.

Oleh sebab itu, tambahnya, Kami meminta agar Pemerintah meninjau ulang penggantian nama Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated tersebut dan memberikannya kepada Pahlawan Nasional. selain itu la memandang perlunya ketentuan terkait pemberian nama jalan nasional.

"Sebaiknya dalam hal ini Pemerintah harus menyiapkan aturan pemberian nama pada setiap Aset milik negara dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa" imbuah Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

"Sebaiknya dalam hal ini Pemerintah harus menyiapkan aturan pemberian nama pada setiap Aset milik negara dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa"

Stop Wacana Pindah Ibukota!

Aleg PKS Minta Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi

KUTIPAN

Jakarta (20/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyinggung rencana Pemerintah yang mengumumkan pra-desain Istana Negara hingga menuai banyak kontroversi dari kalangan arsitek.

Menurut Anggota Komisi V Ini, kontroversi terjadi karena pra-desain tersebut tidak dibuat oleh orang yang ahli dibidang arsitektur sebagaimana amanat UU Arsitek dan juga ditengarai berpotensi pemborosan dana.

"Pengumuman tersebut sekali lagi memperlihatkan tindakan Pemerintah yang terburu-buru dan tidak cermat. Begitu pula dengan isu pemindahan Ibu Kota Negara, sama-sama terkesan terburu-buru," ujar pria yang akrab disapa SJP ini.

SJP menambahkan, di satu sisi kondisi Indonesia dan dunia saat ini masih berjuang melawan Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhirnya, dimana banyak negara saling memperebutkan jatah vaksin.

"Sebagai contoh Indonesia

pun telah terkena pemotongan jatah vaksin sebesar 10 juta dosis vaksin AstraZeneca buatan India, karena negara tersebut memutuskan untuk tidak mengekspor vaksin buatannya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya," papar Suryadi.

Namun demikian, imbuhnya, kondisi pandemi ini tidak dianggap sebagai penghalang bagi Pemerintah untuk melanjutkan megaproyek pemindahan Ibu Kota Negara yang diperkirakan setidaknya akan memakan biaya hingga sekitar Rp90T dari APBN dan sekitar Rp400T dari swasta dan BUMN.

"Padahal perekonomian negara dan masyarakat masih belum pulih, banyak warga negara yang masih membutuhkan bantuan agar

ekonominya bisa berjalan kembali seperti sedia kala," ungkapnya.

Hal ini, kata Suryadi, tampak dari masih berlakunya Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

"Berlakunya Perppu ini menunjukkan bahwa ekonomi nasional berada dalam keadaan darurat akibat pandemi Covid-19 yang tentu tidak sebanding dengan urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Sebab saat ini tidak ada kedaruratan yang terjadi di Ibu Kota Negara DKI Jakarta yang menyebabkan perlunya pemindahan Ibu Kota Negara," urainya.

Kondisi Pandemi pun, lanjutnya, sama-sama terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya di DKI Jakarta saja, bahkan termasuk di wilayah yang direncanakan akan menjadi Ibu Kota Negara yang baru.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Komisi V DPR RI

“Kontroversi terjadi karena pra-desain tersebut tidak dibuat oleh orang yang ahli dibidang arsitektur sebagaimana amanat UU Arsitek dan juga ditengarai berpotensi pemborosan dana. Pengumuman tersebut sekali lagi memperlihatkan tindakan Pemerintah yang terburu-buru dan tidak cermat. Begitu pula dengan isu pemindahan Ibu Kota Negara, sama-sama terkesan terburu-buru”

PELAJARAN BERHARGA

Musibah KRI Nanggala 402



Amin Ak. “Musibah KRI Nanggala 402 ini merupakan peringatan besar. Keberadaan kapal selam dan Alutsista lainnya sangat penting bagi pertahanan suatu negara, khususnya negara yang memiliki wilayah perairan luas seperti Indonesia.

Mulyanto “Dalam kasus ini kita perlu mengerahkan semua kemampuan riset yang dimiliki untuk menganalisis penyebab kecelakaan KRI Nanggala 402 secara akurat, sehingga tidak menjadi polemik spekulatif yang bernuansa politis di masyarakat,

Aboebakar Alhabsy “Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat mahal, dan harus dilakukan sebuah investigasi yang menyeluruh dengan bukti-bukti yang ditemukan agar dapat diketahui dengan pasti apa penyebab sebenarnya KRI Nanggala-402 tenggelam”

Kharis. “Kami di Komisi 1 akan mendukung penuh upaya bersama semua Mitra terkait untuk perbaikan alutsista kedepan dan berharap semua Prajurit yang gugur agar dinaikkan pangkatnya sebagai penghormatan negara”

Nasir Djamil. “Selaku manusia tentu kita harus ikhlas, namun selaku Anggota Parlemen saya akan mengajak para kolega Anggota DPR-RI agar pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta agar pemerintah dapat belajar dan hal serupa bisa dihindari dikemudian hari.

Sukamta “Terlalu mahal harga nyawa Anggota TNI kita. Apalagi negara berkewajiban melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jangan mereka menjadi korban akibat kelalaian peremajaan alutsista kita, justru di saat saat latihan”

Anggota FPKS Desak Pemerintah **Transparan** dalam Penjualan Jalan Tol

KUTIPAN

Anggota Komisi VI DPR-RI Amin mengingatkan pemerintah agar jangan gegabah dalam melakukan program-program pembangunan.

Surabaya (24/04) — Skema Bangun-Jual yang diterapkan pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur jalan tol menuai polemik ditengah masyarakat. Konsep pendekatan pembangunan infrastruktur dengan sistem "bangun-jual" jalan tol ini mengikuti strategi bisnis yang diterapkan di Cina.

Anggota Komisi VI DPR-RI Amin mengingatkan pemerintah agar jangan gegabah dalam melakukan program-program pembangunan.

"Tidak perlu semuanya dengan skema bangun-jual, proyek-proyek strategis tetap harus dalam kendali pemerintah," tutur Amin.

Anggota Fraksi PKS ini juga menjelaskan kalau proyek infrastruktur jalan tol dibangun lalu dijual ke swasta semua, ini dapat menimbulkan monopoli

dan oligopoli swasta.

"Pasar monopoli-oligopoli ini bersifat price maker (penentu harga/tarif), maka rakyat kecil yang akan dirugikan. Jadi pembangunan jalan tol ini untuk siapa?," ungkap Amin.

Karena itu, pemerintah harus transparan dalam proses penjualan jalan tol, khususnya dalam divestasi tol Medan-Kualanamu yang menjadi sorotan publik. Harus dibuka berapa nilai buku, laporan keuangan diungkap ke publik supaya tidak menimbulkan polemik.

"Kami akan panggil Kementerian BUMN ke DPR untuk menjelaskan hal ini," paparnya.

Amin memahami bahwa proses divestasi dapat mengurangi rasio pinjaman terhadap modal yang dimiliki,

sehingga cash flow keuangan perusahaan bisa tetap sehat. Namun harus tetap transparan ke publik terhadap cash flow yang dimiliki.

Lagi pula, skema bangun-jual bukan satu-satunya jalan. Ada skema sekuritisasi aset. Dengan skema ini, pemerintah masih punya ownership, jadi masih bisa mengendalikan.

"Dan yang paling penting, proses penjualan saham oleh BUMN juga harus sesuai dengan aturan hukum dan Undang-undang yang berlaku, sehingga tidak berdampak pada kerugian bagi rakyat kecil," pungkas Amin.



"Pemerintah harus transparan dalam proses penjualan jalan tol, khususnya dalam divestasi tol Medan-Kualanamu yang menjadi sorotan publik. Harus dibuka berapa nilai buku, laporan keuangan diungkap ke publik supaya tidak menimbulkan polemik. Kami akan panggil Kementerian BUMN ke DPR untuk menjelaskan hal ini"



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

Legislator PKS Dorong Pemerintah **Manfaatkan Momentum Lebaran** untuk **Kebangkitan Ekonomi**

KUTIPAN

Jakarta (25/04) --- Tidak lama lagi mayoritas masyarakat di Indonesia akan membelanjakan uang mereka untuk membeli barang dan jasa, sebagai persiapan menghadapi lebaran Idul Fitri tahun 2021.

Momentum tahunan ini harus dimanfaatkan menjadi pemacu dan pemicu pulihnya perekonomian dalam negeri. Pemerintah juga harus mampu menjaga supply and demand semua barang.

Demikian pernyataan yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Abdurrahman di Jakarta.

"Kita harus memaksimalkan momentum puasa dan lebaran tahun ini sebagai momen pulihnya perekonomian, ditandai dengan meningkatnya kegiatan jual beli di masyarakat," ungkap Mahfudz.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, terang Anggota Fraksi PKS asal Depok Bekasi dan Depok ini, harus tepat

asaran dan memiliki tujuan yang ditunggu publik.

"Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membelanjakan uangnya dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan yang memadai menjadi keharusan. Fungsi pengawasan dari pihak terkait harus benar-benar berjalan," terangnya.

Mahfudz mengapresiasi sikap pemerintah dengan kebijakan mempercepat cairnya Gaji ke-13 dan THR, sehingga diharapkan masyarakat lebih leluasa untuk membelanjakan uangnya. Yang otomatis memberikan dampak signifikan dalam mendorong peningkatan pergerakan ekonomi ke kondisi yang lebih baik.

"Kebijakan larangan mudik

juga diharapkan akan membantu pulihnya sektor perdagangan dan jasa di kota-kota besar. Walau kita juga tidak bisa memungkiri jika larangan mudik ini, akan berdampak bagi pelaku usaha transportasi, mengalami nasib tidak menguntungkan," pungkasnya.

Atas hal tersebut, ungkap Mahfudz, pihaknya meminta pemerintah memberikan kebijakan insentif untuk pelaku usaha transportasi.

"Agar mereka bisa bertahan dan kita berdo'a agar lebaran tahun depan, kegiatan mudik tidak lagi dilarang," ucap Anggota Komisi VI dari daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi ini.

Lebih lanjut Mahfudz menyatakan semua bisa memahami kenapa pemerintah mengambil langkah melarang mudik tahun ini.

"Masih tingginya penyebaran Covid-19 di Indonesia menjadi alasan yang utama. Kita tidak mau malah nanti setelah mudik lebaran, terjadi peningkatan bahkan ledakan positif Covid-19 di seluruh Indonesia. Pahit memang, tapi

**H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**

Anggota Komisi VI DPR RI

"Momentum tahunan ini harus dimanfaatkan menjadi pemacu dan pemicu pulihnya perekonomian dalam negeri. Pemerintah juga harus mampu menjaga supply and demand semua barang."

untuk kebaikan kita semua," terang Mahfudz.

"saat ini kita sudah berada pada arah yang benar, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini, situasi perekonomian kita mulai menunjukkan trend positif dan pulih.

Kondisi ini, imbuhnya, ditandai dengan naiknya tingkat konsumsi, investasi, ekspor dan

belanja pemerintah.

"Dimana pernyataan yang disampaikan Menko Perekonomian ini merupakan data di bulan Maret 2021, kita berharap April dan Mei ini akan semakin membaik. Sehingga perekonomian kita bisa pulih lebih cepat. Marilah kita jadikan lebaran tahun ini sebagai momentum kebangkitan perekonomian Indonesia," tutup Bendahara Umum DPP PKS ini.

Anggota FPKS Tolak Wacana Pencabutan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

KUTIPAN

Jakarta (19/04) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto mengkritisi rencana Pemerintah yang akan mengubah skema subsidi elpiji 3 kilogram dan minyak tanah menjadi subsidi berbasis orang dalam program perlindungan sosial alias bantuan nontunai.

"Sikap PKS tidak setuju terhadap pencabutan subsidi apa pun kepada masyarakat. Sebab pencabutan subsidi di saat-saat sekarang ini justru akan menambah beban ekonomi masyarakat bertambah berat," kata politisi Fraksi PKS itu.

Menurut Rofik, subsidi berbasis orang itu sudah ada programnya, yakni berupa PKH, bansos, PIP dan program-program lainnya. Namun data penerima manfaat program-program tersebut sampai sekarang masih carut marut.

"Saat ini Pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat

besar kemungkinan akan bermasalah," katanya.

Rofik menambahkan, PKS lebih mengkritisi pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengalihkan subsidi barang ke orang karena Pemerintah gagal meningkatkan capaian tepat sasaran.

"Menjadi tantangan, tanggung jawab dan tugas Pemerintah agar subsidi lebih tepat sasaran," tegas Rofik.

Dia menyarankan, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, Pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin.

"Sedikan data valid tentang jumlah pedagang kecil,

industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap, baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap," pungkasnya.

Lebih lanjut Rofik juga menyatakan ketidaksetujuannya rencana pemerintah akan menghapus BBM jenis premium. Karena hajat ketahanan energi bagi masyarakat luas.

"Premium saat ini mendapat subsidi tetap dan kompensasi di mana Pertamina menjual di bawah harga HPP. Isu yang dibangun adalah soal emisi karbon gas buang, isu polusi dan green energy. Padahal dampak konversi lahan hutan menjadi sawit dan pertambangan lebih berbahaya bagi kebersihan udara," jelas legislator dari Dapil Jateng VII itu.

"Saya kira belum saatnya Premium dihapus karena hajat ketahanan energi bagi masyarakat luas. Kecuali Pertamina menetapkan harga BBM RON tinggi yang bersih dengan harga yang dapat diakses masyarakat luas dan disubsidi," tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan

**H. ROFIK HANANTO, S.E.**

Anggota Komisi VII DPR RI

"PKS lebih mengkritisi pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengalihkan subsidi barang ke orang karena Pemerintah gagal meningkatkan capaian tepat sasaran. Menjadi tantangan, tanggung jawab dan tugas Pemerintah agar subsidi lebih tepat sasaran"

Kacaribu mengatakan subsidi elpiji 3 Kg akan diberikan langsung kepada warga miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) mulai tahun depan.

Agar penyaluran subsidi dengan skema tertutup ini

berjalan lancar dan tepat sasaran, pemerintah juga telah melakukan perbaikan sistem DTKS bersama pemerintah daerah melalui updating, verifikasi dan validasi data.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Wakil Ketua FPKS: Listrik Indonesia Sudah Mahal, Jangan Dinaikan Lagi

KUTIPAN

Jakarta (17/04) --- Fraksi PKS DPR RI menolak rencana Pemerintah melaksanakan penyesuaian tarif dasar listrik.

Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto, penyesuaian tarif dasar listrik di saat pandemi adalah langkah yang tidak tepat, mengingat kegiatan ekonomi masyarakat belum pulih benar.

"Selain itu harga listrik di Indonesia sudah mahal dibandingkan harga listrik beberapa negara ASEAN bahkan dengan China," ungkapnya.

Data dari Globalpetrolprice.com menyebutkan harga listrik untuk rumah tangga di Malaysia, Vietnam dan China masing-masing sebesar Rp 895/kWh, Rp 1.190/kWh, dan Rp 1.219/kWh.

Sementara harga listrik PLN untuk pelanggan rumah tangga rata-rata Rp 1.467/kWh. Harga listrik di Thailand lebih mahal dari Indonesia, yakni sebesar Rp 1.771/kWh.

"Harga listrik rumah

tangga di Indonesia hampir dua kali lipat dari harga listrik rumah tangga di Malaysia dan masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga listrik di Laos, Vietnam dan China," sebut Mulyanto.

Untuk harga listrik pelanggan bisnis, imbuhnya, dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Vietnam dan China, termasuk Thailand harga listrik PLN memang jauh lebih murah.

"Berbeda dengan Malaysia atau Vietnam yang lebih memilih kebijakan penyediaan listrik murah bagi kebutuhan pelanggan rumah tangga, Indonesia lebih memilih kebijakan menyediakan listrik murah untuk pelanggan bisnis," jelas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, PKS usul ke depan Pemerintah perlu mengkaji secara seksama kebijakan harga listrik ini agar lebih adil dan berpihak kepada

masyarakat kecil ketimbang kepada para pengusaha.

Selain itu, PLN harus terus menerus melaksanakan efisiensi yang berkeadilan atas angka BPP (biaya pokok pembangkitan listrik)-nya.

"Masak harga listrik kita kalah murah dibandingkan dengan Malaysia. Ini kan aneh," imbuh Mulyanto.

Mulyanto juga minta PLN untuk negosiasi ulang mengenai jadwal operasi pembangkit baru agar tidak semakin menekan keuangan PLN.

"Jangan sampai program 35 ribu MW semakin menambah surplus listrik yang sudah lebih dari 30%, yang akhirnya membuat PLN terkena penalti untuk membayar TOP (take or pay) atas listrik yang tidak digunakannya. Ini kan mubazir, yang ujung-ujungnya menjadi beban keuangan Negara. Jangan sampai masyarakat berpikir negatif bahwa kenaikan tarif listrik ini terjadi karena PLN didikte oleh pengusaha listrik swasta (IPP), karena ketergantungan PLN yang semakin hari semakin besar terhadap listrik swasta", tambah Mulyanto.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Harga listrik rumah tangga di Indonesia hampir dua kali lipat dari harga listrik rumah tangga di Malaysia dan masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga listrik di Laos, Vietnam dan China"

19

Tahun PKS

#CintapKSuntukINDONESIA

20 April 2002 - 20 April 2021



PKS

Di Usia 19 Tahun dan Bulan Ramadhan Penuh Berkah Mohon Do'anya Seluruh Pejabat Publik **PKS** Amanah dan Konsisten Melayani Rakyat



Anggota Legislatif

DPR RI

50



Anggota Legislatif

**DPRD
Provinsi**

191



Anggota Legislatif

**DPRD
Kab/Kota**

1.224



Sejak 2017 s.d 2020

**Kada
Wakada**

34 kader



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Kunker ke Kabupaten Subang,

Aleg PKS: Mitigasi Bencana Harus Jadi Prioritas Dorong Kemajuan Daerah

KUTIPAN

Subang (20/04) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, pada Kamis (1/4) dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Kabupaten Subang.

Nur Azizah menyebutkan Kabupaten Subang memiliki sumber daya alam yang lengkap serta sangat strategis, hanya saja perlu ada perhatian lebih dari pemerintah pusat karena sebagian wilayahnya sering terdampak bencana alam.

"Mitigasi bencana di Kabupaten Subang ini harus menjadi prioritas eksekutif dan legislatif sebagai salah satu upaya mendorong kemajuan Kabupaten Subang", ungkap Nur Azizah.

Hujan yang melanda Kabupaten Subang pada tanggal 6 Februari 2021 dengan intensitas curah hujan yang tinggi, telah menimbulkan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Subang.

"Akibatnya, sebanyak 33.683 warga harus mengungsi. Bencana ini juga telah mene-

lan korban jiwa 5 orang, 57 ruas jalan rusak dengan panjang mencapai 301,1 km, sebanyak 21.575 rumah, bangunan sekolah, rumah ibadah dan fasilitas kesehatan terendam banjir dan membutuhkan perbaikan," ungkapnya.

Banjir menggenangi 18 dari 30 kecamatan di Kabupaten Subang, serta tanah longsor di 5 kelurahan/desa. Menurut pemaparan Bupati Subang Ruhimat, berdasarkan investigasi, penyebab banjir dan longsor tersebut diakibatkan karena terjadi pendangkalan sungai, penyempitan aliran sungai, debit air tinggi, tanggul rusak dan kurangnya resapan air.

"Rakyat kami para petani tambah menjadi korban, begitu pula para petani, padi yang baru berusia satu bulan, setiap

tahun pula ribuan hektar habis terkena banjir. Demikian juga rakyat yang berjualan, toko-toko sulit sekali untuk diselamatkan dagangannya. Kabupaten Subang ini memiliki letak geografis yang meliputi pantai maupun gunung. Punya 3 aliran sungai besar yang hulunya dari Gunung Tangkuban Perahu. Namun anugerah tersebut, karena tidak ada pembenahan setiap tahun jadi musibah untuk kami", ungkap Ruhimat.

Ia turut menambahkan bahwa selama ini rakyat Subang sudah banyak melakukan protes, untuk dilakukan pembangunan tanggul permanen agar tidak terjadi lagi banjir setiap tahunnya. Sungai Cipunegara, Sungai Ciasem dan Sungai Cilamaya merupakan tiga sungai utama yang seringkali tanggulnya jebol, berimbas pada banjir. Dana APBN Subang sebesar 2.1 T tidak cukup untuk mengakomodir bencana yang terus berulang, bersama legislatif, perlu ada sinergi dengan pemerintah pusat dan kementerian untuk melakukan upaya penanggulangan



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

“Subang memiliki sumber daya alam yang lengkap serta sangat strategis, hanya saja perlu ada perhatian lebih dari pemerintah pusat karena sebagian wilayahnya sering terdampak bencana alam. Mitigasi bencana di Kabupaten Subang ini harus menjadi prioritas eksekutif dan legislatif sebagai salah satu upaya mendorong kemajuan Kabupaten Subang”

bencana ini.

Menurut Ubay Subarkah, Camat Cipunagara, salah satu kecamatan yang terdampak banjir, saat ini di Subang sedang ada proses pembuatan

Bendungan Sadawarna yang Insya Allah akan selesai tahun 2023, bantuan dari Kementerian PUPR.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

HNW Kembali Desak Mensos **Perpanjang Bansos Tunai**, Bantu Warga Korban Covid-19

KUTIPAN

Jakarta (26/04) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid kembali mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mengajukan perpanjangan program bantuan sosial tunai yang akan berakhir pada April 2021.

Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pernyataan terbarunya juga mengisyaratkan bantuan sosial tunai 2021 masih bisa diperpanjang. Hal ini melengkapi pernyataan Kementerian Keuangan yang sebelumnya juga telah mengisyaratkan hal serupa.

"Bu Risma sudah dapat sinyal positif dari Kemenko PMK dan Kemenkeu, serta mendapatkan dukungan kami di DPR RI, juga pasti dukungan dari Rakyat, untuk mengajukan proposal perpanjangan program bantuan sosial tunai, sehingga seharusnya tidak relevan lagi alasan tidak ada anggaran

untuk tidak mengajukan perpanjangan bantuan sosial tunai tahun 2021 ini", disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (26/04).

Hydayat yang juga Anggota Komisi VIII DPR-RI membidangi urusan sosial ini menjelaskan nasional akan bertambah miskin apabila paket bantuan darurat termasuk bansos tunai tidak dilanjutkan selama 2021.

Menurut laporan Unicef dan Badan Kebijakan Fiskal yang dikeluarkan Maret 2021 memperlihatkan bahwa lebih dari 70% rumah tangga nasional akan bertambah miskin apabila paket bantuan darurat termasuk bansos tunai tidak dilanjutkan selama 2021.

"Sebagian besar masyarakat akan mengalami kehilangan kesejahteraan bersih apabila bantuan dicabut, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan berada di wilayah pedesaan," ungkapnya.

"Pencabutan bantuan sosial juga akan semakin meningkatkan kesenjangan karena pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan lebih banyak menguntungkan kalangan berpenghasilan tinggi melalui berbagai stimulus pemulihan sektor jasa dan manufaktur. Apalagi menurut BPS, per Februari saja, jumlah warga miskin di Indonesia sudah bertambah 2,6 juta jiwa," imbuh Hidayat.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengingatkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2021 berdasarkan keterangan Kemenko Perekonomian masih di kisaran minus 0,3% - 0,5%, padahal dalam periode tersebut program bansos tunai masih dijalankan.

"Artinya, jika program tersebut dihentikan, maka sektor konsumsi yang menyumbang 57% PDB akan

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Mestinya program bantuan sosial tunai itu bisa diwujudkan bahkan dg skema bagian dari program pemulihan ekonomi nasional juga. Karena manfaat program bantuan sosial tunai yang terbukti efektif menggerakkan ekonomi rakyat terdampak covid-19, dan berkontribusi mencegah peningkatan kemiskinan dan kesenjangan akibat Covid-19

semakin sulit bangkit, sehingga berpotensi kembali menahan pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk memperpanjang bantuan sosial

tunai hingga akhir tahun hanyalah Rp 24 Triliun, tentu relatif kecil dibandingkan total anggaran PEN yang hampir Rp 700 Triliun," pungkas HNW. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota FPKS Pastikan Kenaikan Biaya Haji 2021 Tidak Akan Beban Calon Jemaah

KUTIPAN

Jakarta (25/04) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan kenaikan biaya haji tidak bisa dihindarkan, salah satunya, akibat instrumen protokol kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji.

Kendati begitu, imbuhnya, angka kenaikan biaya haji telah berhasil ditekan dibandingkan dengan asumsi kenaikan awal sehingga diharapkan tidak terlalu membebani calon jemaah haji.

"Prokes yang ketat berdampak pada instrumen pembiayaan. Sebab itu, sejak awal Fraksi PKS meminta kenaikan biaya haji dilakukan secara rasional. Artinya, sebisa mungkin tidak terlalu memberatkan jemaah. Terbaru, kami juga sudah memperoleh instrumen kalkulasinya. In shaa Allah, biaya akan tetap naik, tetapi tidak terlalu memberatkan jemaah karena

hanya bertambah di kisaran 1-2 juta," ungkapnya selepas menghadiri acara sosialisasi biaya haji bersama BPKH di Semarang, Sabtu (25/04/2021).

Di sisi lain, Bukhori juga menjelaskan, nominal kenaikan biaya tersebut juga tidak akan melampaui nominal yang mampu ditanggung oleh BPKH dari dana manfaat yang diperoleh setiap tahunnya.

Disinggung terkait persoalan vaksin bagi calon jemaah haji, politisi PKS ini menilai bahwa persoalan itu menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah dan memiliki dimensi yang tidak berdiri

tunggal.

"Sampai tanggal 30 April ini diperkirakan semua calon jemaah haji yang berjumlah 212 ribu ini sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali. Maka harus dipastikan para calon jemaah ini memperoleh efikasinya maksimal sebelum berangkat," paparnya.

Sementara di satu sisi, Alumni Universitas Madina Arab Saudi ini mengungkap, persoalan vaksin ini tidak bisa dilihat dari dimensi kesehatan semata. Ada dimensi politik, khususnya terkait meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika dan Cina. Ia juga meminta pemerintah Arab Saudi bisa lebih bijaksana dalam memahami posisi Indonesia dalam hal ini.

"Kita ketahui bahwa Sinovac ini berasal dari Cina. Sementara Arab Saudi sejauh ini belum menerima calon jemaah haji yang menggunakan vaksin itu. Dengan kata lain, mereka baru berkenan menerima vaksin Made in America maupun sekutunya," imbuhnya. Lagi pula, demikian Bukhori melanjutkan, tidak mungkin



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Prokes yang ketat berdampak pada instrumen pembiayaan. Sebab itu, sejak awal Fraksi PKS meminta kenaikan biaya haji dilakukan secara rasional. Artinya, sebisa mungkin tidak terlalu memberatkan jemaah

calon jemaah haji kita divaksin ulang dengan vaksin berbeda karena berpotensi membahayakan kesehatan mereka.

"Karena itu, hanya ada satu pilihan yang paling rasional, yakni kepiawaian pemerintah Indonesia dalam

melakukan diplomasi sehingga berhasil mendorong pemerintah Arab Saudi untuk berkenan menerima calon jemaah kita", terangnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

WN India Masuk Indonesia, **Aleg PKS: Jangan Kecolongan, Segera Lakukan Larangan Masuk Sementara**

KUTIPAN

“Saudara-saudara kita yang berada di luar negeri harus diprioritaskan pemerintah. Segera berikan perlindungan yang maksimal dan berkoordinasi dengan lembaga maupun institusi-institusi terkait. Proses skrining juga harus diperketat bagi mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung ke negara tersebut kurang dari 14 hari” ungkapnya.

Jakarta (25/04) — Ratusan WN India masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (21/04/2021) dengan menggunakan pesawat sewaan.

Sebagian besar dari mereka adalah ibu rumah tangga dan anak-anak yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Masuknya WN India ke Indonesia sangat

disayangkan mengingat lonjakan kasus COVID-19 di negara tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani meminta pemerintah memperketat akses masuk terhadap WN India.

“Kita harus mengutamakan keselamatan dalam negeri karena di India saat ini sedang terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang

mengerikan. Pemerintah harus memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Jangan sampai kita kecolongan, segera berlakukan larangan sementara,” kata Netty dalam keterangan medianya Minggu, (25/04).

Kebijakan untuk melarang sementara masuknya WN India ke Indonesia, kata Netty sangat mendesak untuk segera diberlakukan.

“Jangan ditunda-tunda lagi dan sangat wajar kalau kita melarang masuk WNA yang kasus COVID-19 di negaranya tinggi dan tidak terkendali. Hal yang sama juga pernah kita rasakan saat di-lockdown oleh negara-negara lain lantaran kasus COVID-19 di negara kita tinggi,” tambahnya.

Netty juga meminta agar pemerintah memperhatikan nasib WNI di negara-negara yang kasus COVID-19 di negara tersebut tinggi.

“Saudara-saudara kita yang berada di luar negeri harus diprioritaskan pemerintah. Segera berikan perlindungan yang maksimal dan berkoordinasi dengan lembaga maupun institusi-institusi terkait. Proses skrining juga harus diperketat bagi mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung ke negara tersebut kurang dari 14 hari” ungkapnya.

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

“Kita harus mengutamakan keselamatan dalam negeri karena di India saat ini sedang terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang mengerikan. Pemerintah harus memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Jangan sampai kita kecolongan, segera berlakukan larangan sementara,

Viral Perawat Dianiaya, Aleg PKS: Undang-Undang Mengatur **Perlindungan** **Tenaga Kesehatan**

KUTIPAN

Jakarta (17/04) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyalahkan tindakan penganiayaan terhadap perawat dari salah satu RS Swasta di Palembang yang viral di media sosial.

Meskipun kini pelaku sudah ditahan aparat kepolisian, Mufida menekankan agar peristiwa penganiayaan terhadap tenaga kesehatan tidak terulang lagi.

Mufida menekankan, jika profesi tenaga kesehatan dilindungi oleh Undang-Undang. Pada Pasal 57 huruf a UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

"Profesi tenaga kesehatan kita sangat dilindungi, apalagi saat ini masih menangani

pandemi yang membutuhkan pengorbanan teman-teman tenaga kesehatan. Tentu tindakan kekerasan apapun bentuknya, tidak boleh terulang terhadap tenaga kesehatan," tutur Mufida dalam keterangannya, Sabtu (17/04).

Mufida merilis data, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mencatat lebih dari 600 insiden kekerasan, pelecehan, atau stigmatisasi terhadap petugas kesehatan, pasien, dan infrastruktur medis Covid-19 pada enam bulan pertama pandemi di dunia.

Di Indonesia pernah terjadi jenazah perawat RSUP dr Kariadi Semarang ditolak warga dan kasus penganiayaan perawat Covid-19 di RSUD dr Haulussy, Maluku.

"Artinya peristiwa di Palembang bukan yang pertama. Kekerasan bukan hanya tentang kekerasan fisik tetapi juga stigma dan diskriminasi sikap. Pemerintah dan organisasi profesi kesehatan harus lebih gencar melakukan pendidikan ini ke masyarakat," papar dia.

Sementara bagi publik, Mufida meminta penyelesaian masalah ditempuh dengan mekanisme yang ada. Jika terindikasi ada pelanggaran etik, standar pelayanan profesi maupun standar prosedur operasional maka bisa dilaporkan ke organisasi profesi masing-masing.

Ia menekankan baik tenaga kesehatan maupun pasien harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan regulasi.

Jika pasien merasa ada dugaan pelanggaran disiplin tenaga kesehatan maka laporkan ke konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Hal ini tertuang dalam Pasal 49 Ayat 1 dan 2 UU No 36 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengaduan dan



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

“Profesi tenaga kesehatan kita sangat dilindungi, apalagi saat ini masih menangani pandemi yang membutuhkan pengorbanan teman-teman tenaga kesehatan. Tentu tindakan kekerasan apapun bentuknya, tidak boleh terulang terhadap tenaga kesehatan”

pengusutan dugaan pelanggaran disiplin tenaga kesehatan oleh Konsil masing-masing tenaga kesehatan. Termasuk sanksi bila benar-benar terbukti ada pelanggaran disiplin.

"Termasuk jika ada indikasi tindakan pidana bisa dilaporkan ke pihak berwenang. InsyaAllah regulasi kita sudah memberikan rasa keadilan bagi tenaga kesehatan maupun kepada pasien," tutur dia.

MINAT BACA INDONESIA MASIH RENDAH



PKS Minta Pemerintah Meningkatkan Akses Baca yang Mudah dan Murah.

- Angka buta aksara Indonesia makin berkurang dari waktu ke waktu. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tidak sejalan dengan tumbuhnya budaya membaca yang membuat tingkat literasi masyarakat Indonesia masih dalam kategori rendah.
- Kemendikbud menyusun Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca). Kategori Indeks Alibaca dibagi menjadi lima kategori

Sangat Tinggi	80,01-100	-
Tinggi	60,10-80,00	-
Sedang	40,01-60,00	9 provinsi
Rendah	20,01-40,00	24 provinsi
Sangat Rendah	0-20,00	1 provinsi

Rata-rata Indeks Alibaca Nasional :

37,32 % (Rendah)



- Penyebab rendahnya minat dan kebiasaan membaca :



1 Kurangnya akses dan daya beli masyarakat, terutama untuk masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil.



2 Tantangan multisektoral di Indonesia bagian timur, salah satunya karena kesenjangan pendidikan dan kemampuan dasar. Empat provinsi yang memiliki tingkat literasi terendah : Papua, Sulawesi Barat, NTT & NTB.



3 Perkembangan buku digital dan kurangnya produksi buku berkualitas, karena belum berkembangnya penerbit di daerah, insentif bagi penerbit buku yang kurang adil, dan wajib pajak serta rendahnya royalti bagi penulis

Anggota Fraksi PKS Sayangkan Kemendikbud Lupakan Peran K.H. Hasyim Asy'ari

KUTIPAN

Di tengah suasana kebangsaan dan kesatuan yang masih 'meradang' ini, lanjut Fahmy, beberapa kali kesalahan yang dilakukan Kemendikbud terhadap issue yang prinsip dan sensitif. "Sungguh sangat disayangkan. Semoga menjadi peringatan dan pembelajaran," tegas Fahmy.

Jakarta (20/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menanggapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pimpinan Nadiem Makarim yang kembali membuat heboh dengan tidak mencantumkan pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari dalam kamus sejarah Indonesia jilid 1. "Baru saja melailakan kurikulum Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP No 57 Tahun 2021, kini Kemendikbud menghilangkan nama pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 yang

diterbitkannya," ungkap Anggota Komisi X DPR RI ini.

Padahal, lanjut Fahmy, KH Hasyim Asy'ari punya peran besar dan sangat penting dalam sejarah kebangkitan nasional hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Beliaulah yang menggelorakan semangat pewanu at Islam (Resolusi Jihad fi sabilillah) melawan Pasukan Belanda dan Inggris yg mau kembali menjajah Indonesia," imbuhnya.

Ini, kata Fahmy, bukan kesalahan biasa yang bisa diremehkan.

"Pertama, nama beliau (KH Hasyim Asy'ari) terlalu

besar ketokohnya dan jasanya untuk dilupakan," tegasnya.

Kedua, tambahna, lembaga sepeenting Kemendikbud terlalu naif, ceroboh dan terlalu untuk membuat kesalahan ini.

"Ketiga, yang menimbulkan pertanyaan publik, mengapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan tim Kemendikbud di bawah pimpinan Nadiem kerap dilakukan terhadap issue yang sangat mendasar dan sensitif (?)," tanya Fahmy.

Di tengah suasana kebangsaan dan kesatuan yang masih 'meradang' ini, lanjut Fahmy, beberapa kali kesalahan yang dilakukan Kemendikbud terhadap issue yang prinsip dan sensitif. "Sungguh sangat disayangkan. Semoga menjadi peringatan dan pembelajaran," tegas Fahmy.



**Dr. H. FAHMY
ALAYDROES, MM, M.Ed.**
Anggota Komisi X DPR RI

KH Hasyim Asy'ari punya peran besar dan sangat penting dalam sejarah kebangkitan nasional hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliaulah yang menggelorakan semangat pewanu umat Islam (Resolusi Jihad fi sabilillah) melawan Pasukan Belanda dan Inggris yang mau kembali menjajah Indonesia, Ini bukan kesalahan biasa yang bisa diremehkan

Pemerintah diminta Utamakan Prioritas, **Batalkan** **Pemindahan** **Ibukota**

KUTIPAN

Jakarta (17/04) —
Pemerintah terus
melakukan persiapan
dalam rangka pe-
mindahan Ibu Kota
Negara (IKN) baru

bahkan rencananya dalam
waktu dekat akan memulai
pembangunan istana
kepresidenan di kawasan IKN di
Kalimantan Timur.

Anggota Komisi XI DPR RI,
Junaidi Auly meminta agar
pemerintah membatalkan
rencana pemindahan IKN,
disamping kondisi ekonomi
yang sedang sulit dan masih
dalam situasi pandemi,
pemerintah harus sadar bahwa
kuantitas hutang yang semakin
mengkhawatirkan.

"Pemerintah tidak perlu
memaksakan diri, sebaiknya
fokus saja pada perbaikan
layanan kesehatan dan

pemulihan ekonomi," ujar
Junaidi dalam keterangan
tertulisnya, Sabtu (17/04).

Doktor Ilmu Pemerintahan
ini melanjutkan, Fraksi PKS dari
awal wacana pemindahan IKN
bergulir sudah melakukan
penolakan karena tidak terlalu
urgensi. Kalau pemerintah
mengatakan pemindahan IKN
dalam rangka pemulihan
ekonomi nasional, harusnya
dengan cara lain seperti
pemerataan ekonomi di
berbagai daerah.

Pembangunan IKN baru
disebut akan menelan biaya
hingga Rp 466 triliun dan
sekitar 20 persen dari biaya
tersebut atau sekitar Rp 89
triliun direncanakan akan
dibebankan pada APBN.

"Anggaran tersebut tentu
akan membebani postur APBN,
kondisi keuangan negara saat
ini sedang mengalami defisit.
Jadi kami mendesak agar
pemerintah membatalkan
rencana pemindahan IKN,"
tutup Bang Jun sapaan
akrabnya.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

“Fraksi PKS dari awal wacana pemindahan IKN bergulir
sudah melakukan penolakan karena tidak terlalu urgensi.
Kalau pemerintah mengatakan pemindahan IKN dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional, harusnya dengan cara
lain seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah.”



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

19

Tahun PKS
#CintaPKSuntukINDONESIA
20 April 2002 - 20 April 2021

Selamat Hari Kartini

21 April
2021

*Dengan Semangat Ramadhan, Perempuan Bergiat,
Lingkungan Sehat, Ekonomi Kuat*



Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. ● Hj. Nevi Zuairina ● Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag ● Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T ● Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.
Saadiyah Uluputty, S.T ● Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A

Peringatan Hari Kartini

Netty Minta Pemerintah Perhatikan Pendidikan Bagi Perempuan

KUTIPAN

Jakarta (21/04) — Politisi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetyani dalam Peringatan Hari Kartini yang jatuh pada Rabu (21/04) ini, menekankan peran perempuan sebagai tiang penopang sebuah negara.

"Perempuan adalah tiangnya negara, karena itu rusaknya tiang akan berdampak besar terhadap bangunan negara tersebut. Perempuan-perempuan Indonesia harus menjadi tiang yang kuat, dengan begitu baru kemudian kita dapat menjadi negara yang kokoh dan maju," ujar Netty yang saat ini duduk di Komisi IX DPR RI, pada Rabu (21/04).

Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini juga menolak adanya anggapan bahwa perempuan tidak harus berpendidikan tinggi.

"Justru sebaliknya perempuan harus punya pendidikan dan cerdas karena perannya sebagai tiang negara. Negara harus hadir mendukung

dengan kebijakan afirmatif untuk mengakselerasi pendidikan bagi kalangan perempuan. Saya berharap Peringatan Hari Kartini tidak hanya sekadar seremonial saja tapi juga diikuti dengan aksi yang konkret dari pemerintah," tambahnya.

"Di pelosok-pelosok negeri masih banyak kita temukan perempuan yang terpaksa harus berhenti belajar. Apakah itu karena keterbatasan ekonomi atau alasan-alasan lain sebagaimana yang saya sampaikan. Hal ini harus menjadi perhatian dari pemerintah, apalagi saat ini kita sedang melawan Covid-19 yang banyak mengubah wajah pendidikan kita. Bagaimana masa depan pendidikan kita di

tengah pandemi? Seperti apa perlindungan terhadap guru dan tenaga pendidik di tengah pandemi, mengingat akan dilakukannya PTM? Jangan sampai PTM dilakukan tapi perlindungan terhadap guru dan tenaga pendidik minim" katanya.

Saat Indonesia dilanda Covid-19, kata Netty perempuan juga menjadi salah satu pihak yang terkena dampaknya. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan sebanyak 623.407 pekerja perempuan terkena dampak COVID-19. Beberapa dari mereka dirumahkan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pemulangan pemangangan akibat penyakit itu.

"Banyak perempuan terkena PHK dan dirumahkan karena COVID-19, padahal tidak jarang dari mereka yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Seain itu pandemi COVID-19 juga menyebabkan meningkatnya kekerasan di rumah tangga, pemerintah harus turun untuk menyelesaikannya" katanya.

Terakhir, bagi perempuan di seluruh Indonesia, kata Netty

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Perempuan-perempuan di tanah air saat ini sudah banyak yang mengisi pos-pos strategis di dalam negara. Keterwakilan suara perempuan di parlemen juga terus meningkat dan saya percaya hadirnya suara perempuan akan menjadi penyeimbang dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara

harus tetap percaya diri dan tidak takut untuk bersaing.

"Perempuan-perempuan di tanah air saat ini sudah banyak yang mengisi pos-pos strategis di dalam negara. Keterwakilan suara perempuan di parlemen

juga terus meningkat dan saya percaya hadirnya suara perempuan akan menjadi penyeimbang dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara" tandasnya.

Aleg PKS Sampaikan Relevansi dan Makna Hari Kartini di Era Pandemi bagi Perempuan Minang

KUTIPAN

Padang (21/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuarina memandang, peran penting perempuan bagi perayaan Hari Kartini di era pandemi Covid-19 ini

ditengah keluarga dan masyarakat adalah yang paling utama kita sebagai perempuan bersyukur kepada Allah SWT karena kemuliaan yang diberikan-Nya.

Hal ini, kata Nevi, terbukti dari Alquran yang menyebut perempuan dengan Annisa' atau Ummahat. Maknanya sama dengan ibu, atau 'kutan Bagi Umat' dan tiang suatu negeri.

"Masyarakat yang baik lahir dari Ibu yang baik. 'Ibu (an-Nisa') adalah tiang negeri' (al Hadist). Jika kaum perempuan dalam suatu negeri berbudi pekerti baik (shalihah), niscaya akan sejahtera negeri itu", tutur Nevi.

Politisi PKS ini melihat relevansinya dengan makna Hari Kartini di era pandemi ini, adalah bagaimana setiap insan

perempuan Indonesia, harus dapat menyelami sejarah kehidupan Ibu Kartini yang bisa menjadi tauladan bagi kaum perempuan Indonesia.

Nevi menambahkan, Salah satu karakter Kartini adalah ketekunannya dalam melakukan perubahan. Para perempuan dengan konsep sisterhood, saling bekerjasama, juga dapat melakukan banyak hal yang positif untuk mengatasi pandemi ini.

"Modalitas sisterhood, bekerja dengan hati serta profesional, sebagaimana dicontohkan oleh komunitas atau organisasi perempuan yang ada di Nusantara ini akan membantu menghadang Covid-19 ini secara signifikan. Hal ini sejalan dengan teori perbedaan yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu

mempunyai keunikan sendiri-sendiri yang saling melengkapi, perempuan itu bekerja dengan hati, mempunyai jiwa keibuan yang selalu ingin melindungi anaknya, memberikan kehangatan pada anak-anaknya, dekat dengan alam, kelekatan dalam sisterhood, dan karakter positif lainnya yang berbeda dengan laki-laki." Urai Nevi.

Legislator asal Sumbar ini melanjutkan Dalam Pandangan Syarak (Syariat Agama Islam) disebutkan ad-dunya mata'un, wa khairu mata'iha al mar'ah as-shalihah artinya perhiasan paling indah adalah perempuan saleh (perempuan yang istiqamah pada peran dan konsekwen dengan citra-nya).

"Risalah Agama mengutamakan pendidikan akhlaq. Sebuah bangsa akan tegak dengan kokoh karena etika moral dan akhlaknyanya. Etika dan moral itu dibentuk oleh budaya dan ajaran agama. Moral anak bangsa yang rusak, membuat bangsa terkoyak", tegasnya.

Aktivis perempuan PKS ini mengatakan bahwa Rumah tangga sebagai extended family

**Hj. NEVI ZUAIRINA**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Masyarakat yang baik lahir dari Ibu yang baik. 'Ibu (an-Nisa') adalah tiang negeri' (al Hadist). Jika kaum perempuan dalam suatu negeri berbudi pekerti baik (shalihah), niscaya akan sejahtera negeri itu",

(inti keluarga besar) dalam budaya Minangkabau menjaga dan mencetak generasi bermoral, dengan filosofi yang jelas, Adat bersendi syarak – syarak bersendi Kitabullah. Kaum perempuan (bundo

kandung, pemilik suku) berperan mendidik, menjaga nikmat Allah. Kaum lelaki (pemilik nasab), membentuk generasi berdisiplin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Maknai Hari Kartini, Anis: PKS Telah **Beri Ruang yang Luas** Bagi Perempuan untuk Berjuang Bersama

KUTIPAN

Jakarta (26/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati, hadir dan menjadi pembicara dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Jakarta Timur, pada Kamis (22/4/2021).

Webinar dengan tema Giat Perempuan Selamatkan Bumi ini, digelar dalam rangka memperingati hari Kartini yang jatuh pada 21 April dan hari Bumi yang jatuh pada 22 April.

Anggota komisi XI DPR RI ini memulainya pemaparannya dengan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali pejuang-pejuang perempuan.

Selain R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, dan Martha Christina Tiahahu yang sudah sangat dikenal, ada sejumlah perempuan lain yang turut melukis sejarah Indonesia.

Ada Ratu dari Kesultanan Aceh, Sultanah Taj ul-Alam Safiatuddin Syah. Ratu dengan

nama lahir Putri Sri Alam merupakan putri dari salah satu pahlawan nasional Indonesia, Sultan Iskandar Muda. Ada Siti Aisyah We Tenriolle dari Kerajaan Tanette Bugis, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Roehanna Koeddoes dan HR Rasuna Said dari Sumatra Barat.

Ada Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi, atau dikenal dengan Nyi Ageng Serang dari Jawa Tengah, ada Maria Walanda Maramis dari Minahasa, dan ada Andi Depu Maraddia Balanipa dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Anis menegaskan bahwa menghargai perjuangan mereka, berarti melanjutkan

perjuangan mengisi kemerdekaan dengan mempersembahkan kontribusi terbaik kita untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat, seperti yang dicita-citakan PKS.

"Dengan visi PKS 2020-2015 yaitu menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin yang kokoh melayani bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, PKS memiliki spirit pengokohan ketahanan keluarga dengan memberikan penguatan fungsi perempuan," ungkapnya.

Ibu dari delapan putra-putri ini menegaskan, bahwa perempuan memiliki 2 tugas yang mulia. Tugas pertama yang seringkali disebut dengan tugas asasi adalah tugas yang tidak bisa digantikan oleh orang lain yaitu tugas sebagai anak, sebagai istri, dan sebagai ibu.

"Tugas asasi ini tidak bisa digantikan oleh orang lain," tegas Anis.

Dan tugas yang kedua adalah tugas yang melekat pada fungsi diri seorang perempuan dan biasanya terkait dengan profesi. Seperti tugas menjadi guru, menjadi



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS

“Dengan visi PKS 2020-2015 yaitu menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin yang kokoh melayani bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, PKS memiliki spirit pengokohan ketahanan keluarga dengan memberikan penguatan fungsi perempuan”

dosen, menjadi karyawan, menjadi pedagang, dll.

Anis pun menekankan bahwa bagi perempuan PKS, tidak ada perbandingan peran, mana yang lebih mulia. Karena kemudian suatu peran, ditentukan oleh sejauh mana peran itu membawa seorang perempuan

pada ketakwaannya.

Oleh karena itu, dengan berbagai kiprah yang dilakukan oleh perempuan PKS, mereka harus menyadari identitas dan hati diri PKS sebagai partai dakwah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Seminar di Hari Kartini, Aleg PKS : Perempuan Berkontribusi Signifikan Terhadap Pembangunan

KUTIPAN

Masohi (23/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menyebut, perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan.

Tidak hanya pembangunan di desa-desa, kata Saadiah, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.

“Tidak sedikit hasil kajian yang menyebut jika perempuan masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah. Namun, seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan membuktikan bahwa kecerdasan serta kepawaiannya tidak bisa lagi dianggap remeh karena peran signifikan dan turut berkontribusi terhadap pembangunan”, tandas Saadiah Uluputty.

Pandangan ini disampaikan oleh Aleg Perempuan dari dapil Propinsi Maluku ketika menjadi narasumber pada

Seminar yang dilaksanakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan keluarga (BPKK) DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Maluku Tengah di Kota Masohi (21/04).

Seminar yang dilaksanakan dalam rangkaian memperingati Hari Kartini, mengangkat tema ‘Dengan Semangat Kartini, Wujudkan Perempuan Mandiri, Cerdas, Sehat, dan Tangguh, Pilar kokohnya Peradaban Bangsa’. Ratusan perempuan peserta seminar berasal dari berbagai kalangan di kota Masohi, antusias mengikuti kegiatan yang digelar di Hotel Lulu Masohi.

Selain Saadiah, seminar tersebut diisi oleh narasumber lain yakni Praktisi Pendidikan, Nurhayati dan Praktisi Kesehatan, Hapsa Salampessy,

Anggota Komisi IV DPR RI ini mengurai contoh peran perempuan di dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dia menyebut, sektor perikanan, pusat data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) 2018 mencatat sedikitnya 5,6 juta orang terlibat di dalam aktivitas perikanan.

Aktivitas ini mulai dari penangkapan, pengolahan, sampai dengan pemasaran hasil tangkapan.

“Dari jumlah itu, 70% atau sekitar 3,9 juta orang adalah perempuan, pekerjaan produksi perikanan dengan waktu kerja hingga 17 jam”, tandasnya.

Bagi aleg yang terkenal kritis ini, dalam skala nasional, kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya.

“Lebih mengerucut, dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi pene-



SAADIAH ULUPUTTY, S.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

“Dalam skala nasional, kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya.

rus bangsa. Mengingat, perempuan adalah pendidik pertama di dalam keluarga”, kata perempuan asal desa Negeri Lima Kabupaten Maluku Tengah.

Saadiah mengajak perempuan Maluku untuk bangkit agar meminimalisir stigma bahwa perempuan

dalam posisi domestik dianggap sebagai variabel terlamabatnya perempuan untuk berkiprah dalam berbagai sektor. Sebagai salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit. Selengkapnya di fraksi.pks.id



Pantun
Tifatul

19

Tahun PKS

#CintaPKSuntukINDONESIA

20 April 2002 - 20 April 2021

***Kepodang indah
berwarna emas
Menyanyikan lagu
cicak di dinding
Sekarang usiamu
dah **sembilan belas**
Di pentas nasional
bolehlah bersanding***

Silaturahmi ke PCNU Kab. Bekasi, Syaikhul Disebut 'Berdarah' NU

KUTIPAN

Kabupaten Bekasi (23/04) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul melakukan silaturahmi

kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi. Dalam acara itu, Syaikhul disebut sebagai sosok 'berdarah' NU di PKS.

"Saya sempat baca kunjungan Pak Ustadz Syaikhul ke Pesantren Buntet, Cirebon. Beliau ternyata pernah nyantri di sana. Jadi beliau ini punya darah NU," ujar Pembawa Acara saat mengawali sambutan.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Bekasi Komarudin memberikan apresiasi kepada Syaikhul yang mengunjungi kantornya dan bertemu dengan jajaran pengurus.

"Terimakasih kepada Pak Ustadz Syaikhul. Beliau adalah ketua umum partai pertama yang datang ke kami," ungkapnya.

Sementara itu, Syaikhul mengajak Pengurus PCNU untuk bersinergi membangun Kabupaten Bekasi dengan PKS.

"Mari kita bersinergi dengan teman-teman PKS untuk membangun Kabupaten Bekasi," ajak Syaikhul.

Dia juga mengutip QS Ali Imran: 103 tentang pentingnya persatuan antar umat Islam.

"Wa'tashimu bihablillah jami'i'an. Wala tafarroqu. Ayo kita berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai berai!" kata Syaikhul.

Kegiatan silaturahmi ini merupakan agenda reses Syaikhul. Berlangsung dari 16-24 April 2021 di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Hadir dalam acara ini, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Bekasi KH. Syam'un dan pengurus lainnya, Pit Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Budi MM dan lainnya.



"Mari kita bersinergi dengan teman-teman PKS untuk membangun Kabupaten Bekasi. Wa'tashimu bihablillah jami'i'an. Wala tafarroqu. Ayo kita berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai berai!"

Masa Reses di Dapil

Habib Aboe Hadiri Konsolidasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)

KUTIPAN

Banjarmasin (18/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy, menghadiri kegiatan konsolidasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) bersama pengurus DPTD PKS Kalimantan Selatan di Kantor DPW PKS Kalimantan Selatan Banjarmasin, Sabtu (17/04/2021).

Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini mengatakan momentum PSU ini harus benar-benar kita maksimalkan karena akan berpengaruh terhadap Pilkada 2024.

"Kalau kita menang di Pilkada ini maka nantinya 2024 akan lebih mudah untuk memangkannya", Kata Habib Aboe.

Hadir pada kesempatan ini yaitu, Korda Kalimantan Selatan Ardiansyah, Ketua MPW Awan Subarkah, Ketua DPW PKS Kalimantan Selatan Ja'far, Sekretaris Umum DPW PKS Kalimantan Selatan Mushaffa

Zakir yang juga Calon Wakil Walikota Banjarmasin.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa daerah di Kalimantan Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU baik Pilkada Kalimantan Selatan.

Terdapat 827 TPS yang akan menggelar PSU, terbanyak di Kabupaten Banjar dengan 502 TPS, selanjutnya Kota Banjarmasin 301 TPS dan Kabupaten Tapin 24 TPS.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

Momentum PSU ini harus benar-benar kita maksimalkan karena akan berpengaruh terhadap Pilkada 2024. Kalau kita menang di Pilkada ini maka nantinya 2024 akan lebih mudah untuk memenangkannya

Kunjungi Dapil, Hermanto Serahkan Gerobak Sampah pada Masyarakat Padang

KUTIPAN

Padang (16/04) --- Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyerahkan bantuan pemerintah berupa gerobak sampah dan tempat sampah tematik kepada 10 komunitas masyarakat di Kota Padang, katanya.

Bantuan tersebut diserahkan di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Jumat (16/04).

"Setiap hari kita memproduksi sampah. Kalau sampah dibiarkan, bisa menimbulkan berbagai penyakit. Karena itu kita semua bertanggung jawab menangani sampah," papar Hermanto dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

Negara, lanjutnya, juga bertanggung jawab dan hadir bersama masyarakat dalam menangani sampah ini.

"Negara membantu masyarakat dengan pengadaan berbagai fasilitas penanganan

sampah, diantaranya berupa bantuan gerobak sampah dan tempat sampah tematik ini," tutur legislator dari FPKS DPR ini.

Kepada penerima bantuan, Hermanto meminta agar gerobak dan tempat sampah tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar lingkungan senantiasa terjaga kebersihannya.

"Puasa membersihkan hati, zakat membersihkan harta, gerobak sampah membersihkan lingkungan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala DLH Kota

Padang Mairizon menginformasikan bahwa saat ini produksi sampah Kota Padang sebanyak 600 ton per hari.

"Untuk mengelola sampah sebanyak itu Padang masih kekurangan 59 buah container sampah," ungkapnya.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, lanjutnya, dinas mengangkut sampah 2 kali sehari.

"Dengan bantuan gerobak sampah ini maka sampah disalurkan ke bank sampah. Bisa mengurangi sampah yang dikirim ke TPS," tutur Mairizon.

Penyerahan gerobak dan tempat sampah diserahkan Hermanto mewakili Pemerintah Pusat kepada Mairizon mewakili masyarakat Padang. Hadir dalam kegiatan tersebut 3 tokoh muda setempat Dede Suhendi, Ario Munandar, Farid dan Ilham.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Setiap hari kita memproduksi sampah. Kalau sampah dibiarkan, bisa menimbulkan berbagai penyakit. Karena itu kita semua bertanggung jawab menangani sampah. Negara juga bertanggung jawab dan hadir bersama masyarakat dalam menangani sampah ini."



INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA STAGNAN DAN KETIMPANGAN SEMAKIN LEBAR

PKS Minta Pemerintah Serius Meningkatkan Kualitas SDM dengan mempersempit kesenjangan pembangunan manusia hingga tingkat daerah.

- ▶ Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.



- ▶ Ada ketimpangan IPM yang besar antara provinsi-provinsi di Indonesia.



22 Provinsi
70-79 (tinggi)

11 Provinsi
<70 (sedang)

DKI Jakarta
>80 (sangat tinggi)

- 2020 ➔ 80.77
- 2019 ➔ 80.76
- 2018 ➔ 80.47

- ▶ IPM mengukur kualitas hidup masyarakat dengan tiga indikator: Usia Harapan Hidup (UHH), lama dan rata-rata mengenyam bangku sekolah, serta jumlah pengeluaran per kapita.

Bertemu Tokoh Masyarakat, Nevi Serahkan Bantuan Paket Sembako pada Masyarakat

KUTIPAN

Politisi PKS ini merasa sangat bahagia ketika kegiatan ini lancar karena menurutnya, ketika melihat wajah masyarakat tersenyum, menjadikan kenyamanan tersendiri baginya

Pasaman (18/04) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina bertemu tokoh masyarakat Kabupaten Pasaman di kecamatan Dua Koto.

Setelah bertemu tokoh masyarakat di Jorong Kelabu, Nevi melanjutkan ke kampung Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto.

"Hampir tiap hari dua hingga tiga titik saya berkeliling menyapa warga di daerah pemilihan dengan prioritas yang belum di kunjungi tahun lalu. Dengan keterbatasan waktu dan kendala jarak, belum ketemu semua warga di dapil sehingga akan di cecil di sela-sela masa sidang. Kebetulan moment Ramadhan ini pas

dengan jadwal masa reses, dengan setiap hari dapat turun ke lapangan", ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini sejak sebelum Ramadhan sudah bertemu masyarakat dengan berbagai aktivitas menurunkan bantuan mulai dari ambulan, mesin pertanian, alat kesehatan, hingga sembako. Khusus di awal Ramadhan ini, ia fokuskan untuk memberikan sembako sebanyak-banyaknya keluarga. targetnya ribuan paket dapat tersebar merata ke seluruh dapil II Sumbar.

"Pekan ini sudah mulai berjalan pembagian paket ramadhan untuk di sebar ke masarakat. Semakin lebih semakin baik, karena

diharapkan tiap pekan ada penambahan signifikan pembagian paket untuk masyarakat", terang Nevi.

Politisi PKS ini merasa sangat bahagia ketika kegiatan ini lancar karena menurutnya, ketika melihat wajah masyarakat tersenyum, menjadikan kenyamanan tersendiri baginya. Dengan melihat tersenyum warga, sekaligus mengurangi keprihatinan akan Pandemi Covid-19 yang telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat Sumbar khususnya dan Indonesia umumnya.

"Sungguh berat beban yang harus ditanggung mereka hingga saat ini dan belum tampak akan berakhir pandemi yang telah berjalan lebih satu tahun. Bahkan warga yang sebelumnya hampir miskin jatuh ke dalam kelompok miskin saat ini. perlu ada upaya solutif untuk menghadapi PHK yang terjadi selama pandemi terjadi", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

Hampir tiap hari dua hingga tiga titik saya berkeliling menyapa warga di daerah pemilihan dengan prioritas yang belum di kunjungi tahun lalu. Dengan keterbatasan waktu dan kendala jarak, belum ketemu semua warga di dapil sehingga akan di cecil di sela-sela masa sidang. Kebetulan moment Ramadhan ini pas dengan jadwal masa reses, sehingga setiap hari dapat turun ke lapangan

Nur Azizah: Depok Kota Religius, Insyallah 2022 dibangun Madrasah Negeri Terpadu!

KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. dalam agenda Reses Anggota DPR RI Masa Persidangan Ke-4 Tahun 2020-2021

pada Sabtu (17/4) di Jl. Hj.Fatimah, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Nur Azizah menyebutkan di tahun 2022 Kota Depok akan segera memiliki Madrasah Negeri Terpadu. Hal itu disampaikan Nur Azizah di hadapan para Asatidz dan Pengurus Komunitas Jamiyah Subuh Kota Depok.

“Beberapa waktu lalu saya melakukan kunjungan kerja meninjau perkembangan Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok. Saat itu Dirjen Pendis Kemeneg RI menyampaikan, jika semua berjalan lancar, insyallah tahun 2022 di sebagian area UIII ini mulai dibangun Madrasah Negeri Terpadu, maksudnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) pada satu kompleks. Insyallah, ini akan menjadi jawaban aspirasi warga Depok yang mendambakan berdirinya MAN Depok”, jelas Nur Azizah.

Sebagai Anggota DPR RI yang bermitra dengan Kemeneg RI, Nur Azizah menyampaikan bahwa ia telah banyak mendingarkan keluhan Warga Depok yang menginginkan adanya MAN di Kota Depok. Hal ini disampaikan warga, pasalnya Depok yang memiliki visi menjadi Kota Religius tapi hingga saat ini belum memiliki MAN. Menurut Nur Azizah, tentu saja hal itu merupakan pekerjaan rumah tersendiri dan harus segera dicarikan solusinya.

Berdasarkan hal tersebut, sejak menjabat sebagai Anggota DPR RI pada tahun 2019, Nur Azizah sudah secara langsung menyampaikan

aspirasi tersebut kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemeneg, Prof. Muhammad Ali Ramdani. Nur Azizah menyebutkan, bawa ia telah melakukan komunikasi secara khusus dengan Dirjen Pendis agar segera dibangun MAN di Kota Depok.

“Kota Depok belum memiliki MAN, hal ini sudah saya sampaikan di hadapan Dirjen Pendidikan Islam baru saat itu Pak Ali, dalam rapat di bulan Agustus lalu, saya mengingatkan beliau karena di awal saya menjabat sudah pernah menyampaikan usulan ini juga kepada Dirjen Pendis Sebelumnya Prof. Kamarudin. Beliau sudah menjanjikan akan membangunkan MAN dengan syarat pemerintah daerah sudah menyediakan lahan untuk itu. Alhamdulillah, komunikasi saya bersama Dirjen Pendis terus bersambung baik”, jelas Nur Azizah.

Nur Azizah menambahkan bahwa lahan untuk membangun madrasah saat ini telah disediakan Kemeneg, RI.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Jika semua berjalan lancar, insyallah tahun 2022 di sebagian area UIII ini mulai dibangun Madrasah Negeri Terpadu, maksudnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) pada satu kompleks. Insyallah, ini akan menjadi jawaban aspirasi warga Depok yang mendambakan berdirinya MAN Depok”



Profil

- Nama Lengkap **Amin, Ak., MM.**
- Tempat, Tanggal Lahir **Kebumen, 6 Juli 1965**
- Dapil **Jawa Timur IV** (Kab. Jember dan Kab. Lumajang)



Pendidikan

- **SMAN 1 Purworejo**, Jawa Tengah, 1985
- **D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)**, 1988
- **D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)**, 1995
- **Magister Manajemen Univ. Jember**, 2002



Riwayat Pekerjaan

- **Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**, 1988 – 2007
- **Direktur Keuangan di PT BBJ**, 2011 – 2013
- **Direktur Utama PT LBS**, 2014 – 2019
- **Anggota DPR RI**, 2019 - sekarang



Keluarga

- Istri : **Ninik Sukantini**
- Anak : **3 Laki-Laki**
1 Perempuan



Riwayat Organisasi

- **Ketua II Komisariat Mahasiswa STAN**, 1986-1987
- **Ketua I Komisariat Mahasiswa STAN**, 1987-1988
- **Ketua Umum Masjid Baitul Maal STAN**, 1992-1993
- **Ketua Dept SDM Wilda Jatijaya**, 2009 - 2014
- **Wakil Ketua BPW Jatijaya**, 2019-2024



Media Sosial

- f : **Amin Akram**
- t : **@Aminakram_**
- i : **@aminakram_**



Tanda Penghargaan

- **Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun**
- **Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun**

AMIN AK, M.M.

Prihatin Banjir Pekanbaru, Syahrul Aidi Siap Perjuangkan Anggaran di APBN

KUTIPAN

Pekanbaru (23/04) -- Melihat penanganan banjir Pekanbaru yang tidak selesai dari tahun ke tahun, Syahrul Aidi selaku mitra Kementerian PUPR di Komisi V DPR RI berjanji untuk membantu Pemko Pekanbaru menuntaskan penanganannya melalui anggaran APBN.

"Saya sangat prihatin melihat Pekanbaru yang tiap hujan selalu mengalami banjir. Saya tak tahu persis apa persoalan mendasarnya sehingga setiap tahun, kondisinya makin memprihatinkan. Untuk itu, saya pikir dibutuhkan kekompakan kita bersama untuk menyelesaikannya. Saya siap bantu Pemko," Syahrul Aidi saat dihubungi pada Jumat (23/04).

Dia melihat persoalan banjir Pekanbaru ini butuh keseriusan semua pihak baik Pemko Pekanbaru, Pemprov Riau dan pusat. Dana pusat itu menurut Syahrul Aidi tergantung

komunikasi aktif antara daerah dan pusat.

Ada pun syarat yang harus disiapkan Pemko Pekanbaru menurutnya adalah pertama, tuntaskan penerapan masterplan dan Detail Engineering Design (DED). Kemudian aktifkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kemudian lengkapi readiness criteria yang dipersyaratkan oleh Kementerian PUPR. Readiness criteria ini sangat penting. Agar usulan daerah sesuai dengan standar administrasi Kementerian PUPR" tambahnya.

Readiness criteria tersebut

antara lain adalah adanya, surat peminatan, kesiapan lahan, kesiapan Rencana induk dan Detail, kesiapan institusi pengelola dan anggaran pengelolaan, serta kesanggupan menerima hibah.

Penyelesaian banjir ini menurutnya harus ditangani oleh semua pihak. Baik Pemko Pekanbaru, Pemprov Riau dan pemerintah pusat. Namun begitu, harusnya pemko yang getol dan ngotot menjemput dana dari APBD Riau dan APBN.

"Pemko Pekanbaru harus pro aktif menjemput dana APBN dan APBD Riau. Karena pemko lah yang punya wilayah dan masyarakat. Apapun persoalannya, masyarakat hanya tahu ini tanggung jawab pemko. Maka, kita juga meminta keseriusan pemko dalam hal ini" tutupnya.



H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.
Anggota Komisi V DPR RI

"Saya sangat prihatin melihat Pekanbaru yang tiap hujan selalu mengalami banjir. Saya tak tahu persis apa persoalan mendasarnya sehingga setiap tahun, kondisinya makin memprihatinkan. Untuk itu, saya pikir dibutuhkan kekompakan kita bersama untuk menyelesaikannya. Saya siap bantu Pemko"

Reses, Junaidi Auly Kenalkan dan Ajak Masyarakat Gunakan QRIS

KUTIPAN

Lampung Timur (22/04) -- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly

mengenalkan dan mengajak masyarakat menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) sebagai alternatif transaksi pembayaran.

"QRIS merupakan hasil dari kemajuan teknologi dalam transaksi pembayaran, melalui QRIS konsumen dapat membayar tagihan bulanan, belanja sampai dengan donasi dengan lebih cepat, mudah dan aman" ujar Junaidi dalam agenda Sosialisasi Mudahnya Transaksi Keuangan Menggunakan QRIS dengan BI Perwakilan Lampung di Lampung Timur, Rabu (21/04/2021)

Aleg Fraksi PKS ini melanjutkan, Bank Indonesia diharapkan lebih aktif

memberikan edukasi terkait QRIS termasuk didalamnya pada pelaku usaha di perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian ada pemerataan pemahaman yang dimulai dari titik-titik pelaku usaha tersebut.

Selain itu, Politisi dari Dapil Lampung II menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang menggunakan QRIS akan mempermudah operasional transaksi pembayaran, misalnya transaksi tercatat dalam history, tidak perlu uang kembalian dan terhindar dari risiko pencurian dan uang palsu.

Bang Jun sapaan akrabnya, berharap QRIS dapat masuk dalam transaksi pembayaran di ruang-ruang layanan publik pemerintah daerah dan pusat. QRIS akan mempermudah masyarakat dan lembaga pemerintah khususnya dalam rangka akuntabilitas.

"Implementasi QRIS harus didorong secara simultan oleh berbagai stakeholder, dengan demikian akan terbangun konektivitas transaksi pembayaran," pungkash Junaidi.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.
Anggota Komisi XI DPR RI

Bank Indonesia diharapkan lebih aktif memberikan edukasi terkait QRIS termasuk didalamnya pada pelaku usaha di perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian ada pemerataan pemahaman yang dimulai dari titik-titik pelaku usaha tersebut.



Reses di Maluku Tengah, Aleg PKS Buka Puasa dan Bagikan Santunan pada Anak Yatim

KUTIPAN

Masohi (24/04) — Rangkaian kegiatan kunjungan dalam rangka Reses dioptimalkan oleh Anggota DPR RI, Saadiah Uluputty di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Selain menyerap aspirasi masyarakat, Saadiah menggaler kegiatan buka puasa dan berbagi perhatian kepada anak Yatim Piatu.

Di Desa Sepa Kabupaten Maluku Tengah (22/2), Saadiah melaksanakan kegiatan buka puasa dengan 200 anak yatim piatu. Dia juga berkesempatan membagi santunan kepada mereka. Sejumlah tokoh masyarakat Desa Sepa hadir dalam kegiatan tersebut.

“Ramadhan bulan berbagi. Anak-anak yatim waktunya untuk bergembira. Buka puasa dan berbagi sedikit santunan adalah cara membuat mereka bergembira”, kata Saadiah dalam kesempatan buka puasa tersebut.

Kata Saadiah,

mewujudkan solidaritas sosial dengan berbagi kepada bulan suci Ramadhan kepada yatim piatu dan dhuafa menjadi sarana pendidikan bagi jiwa.

Reses yang saya laksanakan di Maluku Tengah tidak hanya mendengar aspirasi publik, tapi juga mencoba untuk menguatkan solidaritas sosial, membersamai anak-anak yatim dan piatu. Bagi saya, ini adalah pendidikan jiwa”, lanjut aleg perempuan PKS ini.

Di Maluku Tengah, lanjutnya, jumlah anak-anak yang tak memiliki orang tua cukup banyak. Pemerintah dan negara mesti hadir untuk memberi perhatian kepada mereka. Momen Ramadhan inilah menjadi cara untuk

menguatkan tanggung jawab sosial tersebut.

Anggota Komisi IV DPR ini menyentil jika konstitusi UUD 1945 mengamanahkan kehadiran negara dalam mengurus anak yatim dan anak terlantar.

“Mereka membutuhkan kehadiran pemerintah dan negara. Pasal 34 UUD 1945 menyebut bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara. Pasal itu juga berlaku bagi anak yatim yang terlantar. Peran ini dapat diwujudkan nyata antara lain di Bulan Suci Ramadhan”, harapnya.

Saadiah bersyukur, banyak pihak yang terlibat dan ambil bagian memberi perhatian bagi anak – anak Yatim. Baik secara pribadi maupun oleh lembaga sosial-sosial.

“Fenomena ini kita syukuri. banyak pihak yang terlibat dan ambil bagian memberi perhatian. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memberi perlindungan, pengayoman, mendidik dan membesarkan anak yatim piatu”, terlantar

Selain di Kabupaten



SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

“Reses yang saya laksanakan di Maluku Tengah tidak hanya mendengar aspirasi publik, tapi juga mencoba untuk menguatkan solidaritas sosial, membersamai anak-anak yatim dan piatu. Bagi saya, ini adalah pendidikan jiwa”

Maluku Tengah, kegiatan buka puasa dan berbagi dengan anak yatim akan digelar pihaknya di kabupaten/kota lainnya di Maluku.

“Dalam keterbatasan yang

ada, Insa Allah kita berusaha mendistribusi perhatian serupa ke berbagai kabupaten/kota di Maluku. Momen Ramadhan ini kita optimalkan”, imbuhnya.



Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan

Masa Reses, Alifudin Turut **bagikan Takjil Gratis** di Dapil

KUTIPAN

Kubu Raya (26/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin membagikan takjil gratis kepada warga yang melintas di depan posko takjil gratis di Perempatan Lampu Merah Desa Kapur, KKR, Minggu (25/04/2021).

Alifudin mengatakan program takjil gratis juga dilaksanakan secara nasional, dengan target 1,9 juta paket takjil yang dibagikan se-Indonesia.

"Bertepatan dengan milad PKS ke 19, target Takjil yang diberikan secara nasional sebanyak 1,9 juta paket takjil se Indonesia, bukan hanya disini, di berbagai tempat dalam waktu bersamaan semua kader, anggota dan simpatisan PKS turut membagikan takjil yang sudah kita siapkan," ujar Alifudin yang juga sebagai Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan.

Alifudin juga berharap dengan adanya program takjil gratis ini bisa membantu dan bermanfaat bagi warga.

"Alhamdulillah saya juga bisa hadir menemani kawan kawan di sini, ikut membagikan takjil kepada warga, semoga apa yang dilakukan oleh PKS baik di Pontianak maupun di daerah lain dapat dirasakan oleh masyarakat, inilah bukti kita bersama melayani rakyat," tambanya.

Ditempat yang sama, ketua panitia Ramadan PKS kalbar, Rusdiyansah mengatakan posko takjil gratis ini total dibuka selama 6 hari di beberapa tempat, dan juga di setiap daerah mengadakan program yang sama.

"untuk tingkat DPW kami membuka selama 6 hari, dan hari ini terakhir, dan di beberapa daerah juga ada yang melaksanakan kegiatan takjil

ini, seperti, memawah, sintang, melawi dan daerah lainnya," jelasnya.

Rusdiyansah juga menjelaskan program PKS berikutnya untuk ramadan kali ini ialah pembagian hadiah idul fitri ke warga yang tak mampu.

"Usai ini kita ada agenda berikutnya yaitu qiswatul 'id yaitu program pemberian hadiah berupa baju baru bagi warga yang tak mampu, kita harap semua warga bisa tersenyum bahagia menyambut lebaran nanti," harapnya.

Rusdiyansah juga mengatakan terimakasih kepada seluruh anggota dan kader PKS karena telah menyumbangkan uangnya untuk pembelian paket takjil dan qiswatul ied.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

Alhamdulillah saya juga bisa hadir menemani kawan kawan di sini, ikut membagikan takjil kepada warga, semoga apa yang dilakukan oleh PKS baik di Pontianak maupun di daerah lain dapat dirasakan oleh masyarakat, inilah bukti kita bersama melayani rakyat



Dalam Rangka Milad PKS dan Lestarkan Seni Islami

HNW Gelar Lomba Hadrah & Qasidah

KUTIPAN

Jakarta (25/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Dapil Jakarta II, Hidayat Nur Wahid, dalam rangka memperingati Milad PKS ke XIX dan untuk mengapresiasi dan melestarikan seni budaya Islami

menggelar lomba hadrah dan qasidah 2021 se-Jakarta Selatan.

Lomba tersebut bertujuan memberikan variasi kegiatan positif bagi para anak muda dan ibu-ibu, di bulan Ramadhan, di tengah masih menyebarnya covid-19.

HNW sapaan akrabnya menuturkan, saat reses bertemu secara virtual dengan konstituen dari beberapa DPC PKS (Mampang, Kebayoran Baru, Tebet) dan menyampaikan komitmen PKS mendukung kegiatan positif para anak muda yang tergabung di banyak grup hadrah dan emak-emak di grup qasidah. Apalagi kegiatan kesenian tersebut juga sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Betawi. "PKS sangat peduli

dengan budaya yang berkembang di tengah Umat. Hadrah dan qasidah itu sudah menjadi satu kesatuan dengan budaya masyarakat Betawi, karena itu kita dan PKS selenggarakan lomba hadrah dan kasidahan ini," ujar Wakil Ketua MPR RI melalui siaran pers di Jakarta, Ahad (25/04).

Menurutnya, kegiatan ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

ini mengatakan pendaftaran lomba yang dilaksanakan dalam rangka milad PKS ke-19 ini dibuka pada 14 April – 23 April 2021.

"Alhamdulillah, antusiasme warga untuk mengikuti lomba ini sangat bagus, sekaligus menunjukkan bahwa masih banyak anak muda dan emak-emak yang ikut menjaga dan melestarikan budaya Betawi yang Islami ini," tukasnya.

Sejumlah 70-an grup hadrah dan qasidah sudah mendaftar dan akan mempersembahkan Piala Hidayat Nur Wahid dan uang pembinaan.

Panitia akan menetapkan 6 grup yang akan menjadi finalis dan mengumumkan pemenangnya pada 1 Mei 2021, pada acara peringatn Nuzulul Quran oleh DPC PKS JakSel.

Panitia akan menilai para peserta berdasarkan beberapa kriteria penilaian, yakni kualitas vokal (25%); kualitas musik dan teknik bermain (25%); harmonisasi/keompakan antara vokal-vokal, musik-musik, dan vokal-musik (30%); pembawaan (penghayatan, interpretasi, espresi) (10%), penampilan (busana, adab, keserasian) (10%).

"Sedangkan penilaian, selain akan dilakukan oleh Dewan Juri, juga akan melibatkan masyarakat dengan mengundang video rekaman grup hadrah dan qasidah tersebut ke Youtube pada 27-30 April 2021. Jumlah viewer dan like dalam setiap video akan



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"PKS sangat peduli dengan budaya yang berkembang di tengah Umat. Hadrah dan qasidah itu sudah menjadi satu kesatuan dengan budaya masyarakat Betawi, karena itu kita dan PKS selenggarakan lomba hadrah dan kasidahan ini"

menjadi salah satu kriteria penilaian. Semoga lomba ini bukan hanya menumbuhkan semangat untuk ber-hadrah dan ber-Qasidah, tetapi juga keikutsertaan langsung PKS dalam melestarikan dan

memasyarakatkan budaya Betawi dan kegiatan positif tersebut," pungkas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan ini.

Reses di Dapil, Abdul Kharis Ajak Masyarakat Selamatkan Lingkungan di Bengawan Solo

KUTIPAN

Surakarta (25/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari mengikuti kegiatan bersama masyarakat kota Surakarta di daerah aliran sungai (DAS) Sungai Bengawan Solo tepatnya di Sowijan, Kampung Sewu, Jebres, Kota Surakarta, Minggu (25/04).

Anggota Komisi I ini menyebutkan bahwa dirinya Bersama PKS Kota Solo telah membentuk kelompok penyelamat lingkungan yang dinamakan KARSA, dimana komunitas ini berfokus pada penyelamatan lingkungan Sungai Bengawan Solo.

“Kami memiliki kelompok penyelamat lingkungan bengawan solo, dan Alhamdulillah sudah rutin bergerak setiap hari secara bergantian untuk membersihkan daerah aliran sungai bengawan solo,” Ujar

Haris.

Haris menambahkan Karena curah hujan tinggi dan drainase terhambat sampah maka airnya mengantri masuk ke Bengawan Solo.

“Meluapnya sungai Bengawan Solo inilah yang menyebabkan Karanganyar, Kota Solo, dan Sukoharjo kebanjiran. Hendaknya masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan” Tandasnya.

Acara ini diawali dengan agenda Susur Sungai Bengawan Solo dengan titik awal di

Jembatan Mojo, Semanggi, Pasar Kliwon dengan berakhir di di Sowijayan, Kampung Sewu, Jebres. Dalam Agenda susur sungai ini dilakukan pembentangan spanduk bertuliskan “Save Bengawan Solo”.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman 100 bibit pohon akar wangi (vertiver) di daerah aliran sungai (DAS) Sungai Bengawan Solo tepatnya di Sowijan, Kampung Sewu, Jebres.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Alkatiri, Sugeng Riyanto (Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Fraksi PKS), Arifin Mustofa Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, beberapa Pengurus Perempuan dan Kepemudaan DPW PKS Jawa Tengah, perwakilan DPD PKS Surakarta, Sukoharjo, dan Karanganyar. Serta Masyarakat sekitar.



Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah V

“Karena curah hujan tinggi dan drainase terhambat sampah maka airnya mengantri masuk ke Bengawan Solo. Meluapnya sungai Bengawan Solo inilah yang menyebabkan Karanganyar, Kota Solo, dan Sukoharjo kebanjiran. Hendaknya masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan”



Takziah ke Rumah Duka

Nasir Djamil **usul** Pembentukan Tim Pencari Fakta Tragedi Nanggala

KUTIPAN

Banda Aceh (26/04)
— Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan Aceh II M. Nasir Djamil melakukan takziah

ke kediaman rumah duka orang tua dari Letkol Laut (E) Irfan Sufri di Kawasan Lamlagang, Kota Banda Aceh pada Denim (26/04).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Letkol Laut (E) Irfan Suri berada di dalam Kapal Selam KRI Nanggala 402 sebagai pengawas untuk melihat dan menilai latihan menembak senjata strategis TNI AL.

Kehadiran Politisi PKS ini ke rumah duka disambut oleh orang tua almarhum Irfan Suri, Hasan Yacob.

Pada kesempatan itu Nasir membesarkan hati orang tua dan sanak famili Irfan Suri atas kejadian malang ini.

"Adalah sedikit kelegaan dari musibah ini ialah terjadi di bulan yang mulia, bulan ramadhan. insyaAllah prajurit yang gugur akan berada di tempat yang mulia" ungkap Nasir.

Disamping itu, Nasir juga menyampaikan akan berkomunikasi dan mengajak para legislator lainnya untuk mendorong Pemerintah membentuk tim pencari fakta atas tragedi yang memilukan ini.

"Selaku manusia tentu kita harus ikhlas, namun selaku Anggota Parlemen saya akan mengajak para kolega Anggota DPR-RI agar pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta agar pemerintah dapat belajar dan hal serupa bisa dihindari dikemudian hari" tutup Nasir.



“Selaku manusia tentu kita harus ikhlas, namun selaku Anggota Parlemen saya akan mengajak para kolega Anggota DPR-RI agar pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta agar pemerintah dapat belajar dan hal serupa bisa dihindari dikemudian hari”

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Mardani Siap Perjuangkan Penyuluh Pertanian berstatus THL menjadi P3K

KUTIPAN

Mardani juga mengusulkan untuk membuat surat khusus kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berbasis pertemuan hari ini, di mana Fraksi PKS akan memperjuangkan THLTBPP ke PANRB dan memohon untuk pembukaan formasi atau kuota minimal 3000 orang

Jakarta (23/04)—Anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera hadir untuk mendengarkan aspirasi dari Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Nasional (FKHTLTBPP).

Dalam menanggapi aspirasi dari teman-teman THLTBPP, Mardani Ali Sera mengatakan ingin memperjuangkan 3000 THLTBPP yang tersisa, dengan data-data yang tepat.

“PKS sangat mendukung semua upaya untuk

mewujudkan Indonesia negara agraris yang kuat” Kata Mardani.

Selain itu, Mardani juga mengusulkan untuk membuat surat khusus kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berbasis pertemuan hari ini, di mana Fraksi PKS akan memperjuangkan THLTBPP ke PANRB dan memohon untuk pembukaan formasi atau kuota minimal 3000 orang. Doktor lulusan Malaysia ini juga akan berkomunikasi ke Fraksi PKS di

28 provinsi, serta dengan kabupaten/kota agar mengawal isu ini.

“Ini bukan pekerjaan sekali jalan, kita harus tekun untuk terus berkomunikasi dan bersinergi.” Ujar Mardani.

Sementara perwakilan dari THLTBPP Supian Sauri menyampaikan aspirasi terkait masalah kepegawaian teman-teman THL. Pada awalnya 2016 ada rekrutan pengangkatan THL menjadi CPNS. Sayangnya, di THLTBPP masih menyisakan 3000 orang. Selain itu, wilayah di luar Jawa masih banyak yang belum terselesaikan, termasuk di Papua.

“3000 orang ini mohon untuk diaspirasikan, diperjuangkan, agar sama dengan rekan-rekan kami yang 11.000 orang lebih diangkat, semoga ada slot tambahan di 2021 ini, atau paling maksimal di 2022.” Ujar Supian. Supian berharap agar Komisi II memberikan aspirasi mengenai pengangkatan THLTBPP.



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

“PKS sangat mendukung semua upaya untuk mewujudkan Indonesia negara agraris yang kuat. Saya juga mengusulkan untuk membuat surat khusus kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berbasis pertemuan hari ini, di mana Fraksi PKS akan memperjuangkan THLTBPP ke PANRB dan memohon untuk pembukaan formasi atau kuota minimal 3000 orang.



*Turut
Berduka
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

Ir. Untung Wahono, M.Si

Sekretaris Majelis Syura PKS

Pada Selasa 27 April 2021 pk. 03.42 WIB
di RS UI Depok

Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya
serta menempatkannya di tempat
terbaik Jannah-Nya Amin



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Bertemu dengan Demokrat

PKS ingin Silaturahmi dengan Semua Anak Bangsa

KUTIPAN

Syaikhu mengatakan pentingnya partai politik dalam menjaga nilai dan etika demokrasi yang sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Jakarta (22/04) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melanjutkan agenda Silaturahmi Kebangsaan dengan bertandang ke DPP Partai Demokrat, Kamis (22/04).

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran langsung diterima Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama fungsionaris DPP Partai Demokrat.

Ahmad Syaikhu mengungkapkan kunjungan ke Partai Demokrat dalam rangka silaturahmi dengan semua elemen anak bangsa. Syaikhu juga sekaligus memperkenalkan kepemimpinan baru PKS masa bakti 2020-2025 serta mengenalkan lambang PKS yang sudah diremajakan

dengan penambahan warna oranye.

Syaikhu menyebut PKS dan Partai Demokrat memiliki banyak momen kebersamaan selama Pemerintahan SBY pada 2004-2014 termasuk pada perhelatan Pilkada serentak 2020 lalu.

"Harapan kami, kebersamaan ini tentunya akan terus dijalin dalam berbagai momentum politik ke depan," ujar Syaikhu.

Syaikhu mengatakan pentingnya partai politik dalam menjaga nilai dan etika demokrasi yang sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik adalah salah satu pilar utama demokrasi yang harus dijaga dan dibangun dengan sikap negarawan, menghargai

perbedaan, menghormati dan mentaati norma hukum dan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika kepatantasan dan kepatutan publik.

"Kita juga mendorong penguatan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Penegakan hukum harus berpihak kepada nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan rakyat," tegas Syaikhu.

Sebelumnya PKS menggelar rangkaian Silaturahmi Kebangsaan dengan berbagai elemen. PKS mendengar banyak masukan dari pegiat Pemilu dengan bertandang ke Perludem, penegakan HAM dengan bertandang ke KontraS, penguatan nilai antikorupsi dengan menerima delegasi KPK dan pertemuan dengan DPP PPP.



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

"Kita juga mendorong penguatan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Penegakan hukum harus berpihak kepada nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan rakyat"

19 Tahun PKS, Presiden PKS **Beri Catatan Soal Demokrasi, Otonomi dan Penegakan HAM**

KUTIPAN

Jakarta (20/04) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar tasyakuran ulang tahun ke-19 secara luring dan daring, Selasa (20/04).

Presiden PKS Ahmad Syaikhul menyampaikan catatan tentang demokrasi, otonomi daerah dan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Syaikhul menegaskan, PKS lahir dengan semangat ingin mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis.

"Oleh karena itu, jika ada upaya-upaya untuk memutar balik haluan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kembali ke rezim otoriterianisme, maka hal itu telah menghinai semangat dan cita-cita reformasi. Kita sebagai bangsa tidak boleh membiarkan hal itu terjadi," ungkap Syaikhul.

PKS, tutur Syaikhul, akan berjuang sekuat tenaga untuk menjaga dan merawat fitrah demokrasi di Indonesia. PKS akan menjadi penjaga

demokrasi (the guardian of democracy).

"Bersama rakyat dan kekuatan masyarakat sipil, PKS memastikan bahwa roda perjalanan bangsa ini di jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam konstitusi UUD NRI 1945," tegasnya.

Syaikhul menegaskan, sikap oposisi PKS terlahir bukan karena ingin asal beda, tetapi sikap oposisi lahir karena satu kesadaran kebangsaan yang kokoh bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kekuatan penyeimbang.

Syaikhul juga mengingatkan jika semangat reformasi adalah semangat untuk memberikan kemandirian politik dan ekonomi kepada daerah. Bagi PKS, desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya

terkait perimbangan kekuasaan pusat dan daerah, tetapi ini adalah komitmen kebangsaan untuk membangun rasa persatuan dalam bingkai NKRI.

"Namun pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan adalah: apakah desentralisasi dan otonomi daerah ini telah berhasil membawa kepada kemakmuran bagi daerah? Pertanyaan ini tentu akan membawa kita bersama pada satu jawaban yang sama bahwa desentralisasi dan otonomi daerah kita masih berjalan baik secara prosedural tetapi secara substansial masih perlu perbaikan dan penyempurnaan," terang dia.

Syaikhul juga menegaskan amanat reformasi adalah supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Supremasi hukum adalah ayah kandung keadilan. Perlindungan HAM adalah ibu kandungnya. Penegakan hukum dan HAM adalah dua sisi dari mata uang sama dari keadilan.

la mengingatkan jangan sekali-kali penegak hukum mempermainkan rasa keadilan rakyat untuk kepentingan



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

“Jika semangat reformasi adalah semangat untuk memberikan kemandirian politik dan ekonomi kepada daerah. Bagi PKS, desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya terkait perimbangan kekuasaan pusat dan daerah, tetapi ini adalah komitmen kebangsaan untuk membangun rasa persatuan dalam bingkai NKRI.”

kekuasaan dan pendukung kekuasaan. Dan jangan sekali-kali kekuasaan mengintervensi penegakan hukum untuk kepentingan kekuasaan semata. Jangan lukai rasa keadilan rakyat demi

melanggengkan kekuasaan. "Kekuasaan itu akan selalu dipergilirkan. Tidak ada yang abadi di tempat kekuasaan. Pergunakanlah kekuasaan itu dengan arif dan bijaksana," sebut Syaikhul.

Rayakan Milad PKS dengan Sederhana

Habib Aboe: **Bentuk Komitmen** PKS Tangani Covid-19

KUTIPAN

Jakarta (20/04) — Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan penyelenggaraan Milad PKS Ke-19 dengan format sederhana adalah bentuk komitmennya dalam upaya penanganan Covid-19.

"Milad PKS tahun ini diperingati secara khidmat dan sederhana. Tentunya pandemi Covid-19 menjadi perhatian yang serius dari segenap jajaran PKS untuk menetapkan, menentukan, model seperti apa milad ke-19 ini," papar Habib Aboe dalam laporannya di acara Milad PKS ke-19, Selasa (20/04/2021).

Habib Aboe menegaskan komitmen PKS dalam menangani pandemi Covid-19 sehingga setiap kegiatan selalu menerapkan protokol kesehatan.

"Karenanya segala bentuk kegiatan PKS selalu menjadikan penerapan protokol kesehatan sebagai parameter utama. Itu clear, kita menjadikan proses

sebagai parameter utama," tegas Habib Aboe.

Habib Aboe menambahkan pembukaan milad dengan bentuk tasyakuran ini juga diringi dengan muhasabah sebagai bentuk refleksi berbagai musibah bencana alam yang beberapa kali telah menimpa Indonesia.

"Pertimbangan lainnya adalah banyaknya musibah bencana alam yang terus menerus menimpa Indonesia. Oleh karenanya, tasyakuran kita diiringi dengan muhasabah ini adalah bentuk refleksi kita terhadap kondisi tanah air tercinta Republik Indonesia," ujar dia.

Habib Aboe menuturkan

Milad PKS ke-19 ini mengambil tema "Cinta PKS untuk Indonesia" sebagai bentuk kristalisasi semangat pelayanan yang diberikan PKS untuk Indonesia.

"Selama ini cinta PKS telah dimanifestasikan dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Bakti PKS kepada negeri ini sejatinya menjadi jiwa dan ruh seluruh anggota PKS, sesuai tagline Bersama Melayani Rakyat," ucap Habib Aboe.

Dalam pelaporan acara Milad PKS-19 tersebut Habib Aboe membuka dengan sebuah pantun,

Lebag-lebar di daun talas
Dipakai payung disaat hujan
Hari ini Milad PKS ke-19
Kita peringati dengan
kesyukuran



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

"Pembukaan milad dengan bentuk tasyakuran ini juga diringi dengan muhasabah sebagai bentuk refleksi berbagai musibah bencana alam yang beberapa kali telah menimpa Indonesia. Pertimbangan lainnya adalah banyaknya musibah bencana alam yang terus menerus menimpa Indonesia



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV)

***Nantikan
Setiap Pekan***